**BAB II**

**KAJIAN TEORITIK**

1. **Manajemen Pembiayaan**
2. **Konsep Manajemen**
3. **Pengertian Konsep Manajemen**

Beberapa ahli mandang secara berbeda mengenai batasan Manajemen, karenanya cukup sulit memberikan pengertian universal sehingga maknanya mudah diterima setiap orang. Manajemen dalam bahasa Inggris adalah “*to manage*”. Dalam pengertian umum manajemen yaitu mengelola, dan dalam artian khusus manajemen digunakan  dalam kegiatan memimpin yang disebut pimpinan atau manajer, yang dikelola yaitu segala unsur manajemen diantaranya *men, machines, money, material, methods, dan market.*

Manajemen itu adalah suatu upaya yang dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan dengan menjalankan koordinasi terhadap kegiatan orang-orang lain.[[1]](#footnote-1) Manajemen yaitu aktivitas yang dijalankan bagi tiap manajer guna memenej perusahaan, organisasi, ataupun lembaga.[[2]](#footnote-2)

41

Dan manajemen pendidikan Islam yaitu aktivitas guna menjalankan serta mengkombinasikan semua sumber daya pendidikan guna meraih tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan sebelumnya.[[3]](#footnote-3)Selanjutnya Harold Koontz and Cyril O’Donnel menyimpulkan bahwa manajemen yaitu usaha meraiuh tujuan tertentu via aktifitas orang lain. Maka dari itu manajer melaksanakan koordinasi atas aktifitas-aktifitas orang lain diantaranya; perancangan, pengorganisasian, stafing, pengendalian serta pengarahan.[[4]](#footnote-4)

Sesuai dengan pengertian-pengertian manajemen ini, bisa diambil simpulan bahwa manajemen yaitu prosedur meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta pengarahan yang dijalankan agar penetapan serta pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien denganmendayagunakan SDM.

Manajemen juga terdapat dalam ayat suci Al-Quran seperti pada firman Allah SWT QS. As-Sajdah ayat 7berikut:

ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَٰنِ مِن طِينٖ ٧

Artinya*: “Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.” [[5]](#footnote-5)*

Berdasarkan ayat tersebut terdapat kandungan yang bisa kita ketahui bahwa Allah SWT merupakan pengatur alam (Al Mudabbir/Manager). Teraturan alam ini adalah fakta keagungan Allah SWT mengatur alam itu. Kerap kali manajemen dimaknai dengan kiat, profesi, dan ilmu. Follet menyebut dengan kiat disebabkan manajemen meraih targetnya dengan berbagai cara dalam memenej orang lain dalam melaksanakan tugas. Disebut dengan profesi disebabkan manajemen dilaksanakan dengan berlandaskan adanya keahlian yang spesifik untuk meraih performa manajer, serta kode etik yang menuntun para profesional. Luther Gulick menyebut dengan ilmu disebabkan manajemen dianggap sebagai aspek pengetahuan sistematik yang berupaya menginterpretasikan bagaimana dan kenapa seseorang bekerja.[[6]](#footnote-6)

Artian luas menunjukkan manajemen adalah perancangan, pengorganisasian, pengendalian serta pengarahan terhadap sumber daya organisasi guna meraih target dengan efektif dan efisien. Artian sempit menunjukkan manajemen pendidikan yaitu manajemen madrasah/sekolah yang terdiri dari perencanaan program madrasah/sekolah, realisasi program tersebut, kepemimpinan kepala madrasah/sekolah, kontrol serta evaluasi berikut stuktur informasi madrasah/sekolah. Manajemen pendidikan bisa diartikan ilmu dan seni pengaturan sumber daya pendidikan dalam rangka menghasilkan situasi belajar serta aktifitas pembelajaran sehingga dengan aktif peserta didik akan meningkatkan potensinya agar mempunyai kemampuan spirituil keagamaan, kendali diri, intelektualitas, personalitas, akhlak baik, dan keterampilannya sehingga berguna bagi masyarakat dan bangsa.[[7]](#footnote-7)

Adapun pemahaman di atas, bisa diketahui konsep manajemen memiliki konotasi luas diantaranya:

1. Memiliki artian sama terhadap administrasi yang berupaya memberikan pengaruh serta instruksi kepada seseorang untuk produktif dalam bekerja;
2. Secara terpadu mendayagunakan manusai, materi, biaya, cara agar dapat meraih target institusional;
3. Menggapai target melalui orang lain.[[8]](#footnote-8)
4. **Prinsip-Prinsip Manajemen**

Praktik manajemen memiliki berbagai prinsip dasar penting diantaranya: (1) menetapkan metode bekerja; (2) seleksi pekerja serta pengembangan spesialisasi; (3) seleksi metode kerja; (4) benetapkan batasan peran/fungsi; (5) membuat serta menyiapkan pengkhususan tugas; (6) melaksanakan edukasi serta pelatihan; (7) menetapkan struktur serta kadar upah. Kesemuanya ditujukan dalam peningkatan produktivitas, keefisienan serta keefektifan kerja. Fayol mengungkapkan prinsip dasar terkait manajemen diantaranya: pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, ketertiban, kesatuan instruksi dan arah, daripada kepentingan pribadi prioritas diperuntukan bagi kepentingan umum/organisasi, pemberian kontra prestasi, sentralisasi, rantai skalar, pemerataan, stabilitas dalam menjabat, inisiatif, dan semangat kelompok.[[9]](#footnote-9)

1. **Fungsi Manajemen**

Fungsi manajemen menurut James Stoner adalah *organizing, leading, planning, dan controlling* yaitu; 1) Merancang (*Planning*) menentukan target organisasi serta merumuskan strategi, kebijakan, kegiatan, dll. 2) Pengorganisasian (*Organizing*) penetapan sumber daya erta aktifitas yang diperlukan, merumuskan pengelompokan kerja, pemberian tugas, otoritas dan tanggungjawabnya serta sinkronisasi. 3) Pengarahan (*Actuating*) dorongan, komunikasi leadership guna memberikan arahan pada pegawai untuk bekerja sesuai tugasnya. 4) Pengawasan (*Controlling*) Penetapan tolok ukur, skala pelaksanaan, serta penetapan aktifitas korektif.[[10]](#footnote-10) Term manajemen sesungguhnya merujuk pada jalannya kegiatan yang diselesaikan dengan efisien serta mendayagunakan orang lain.[[11]](#footnote-11)

Sejalan dengan pendapat di atas, fungsi-fungsi manajemen meliputi; perencanaa (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), penataausahaan (*organizing*), pengawasan (*controlling*), pertanggungjawaban (*reporting*) apabila kesemua fungsi itu dapat dijalani dengan baik dan sesuai dengan apa yang seharusnya maka dipastikan biaya pendidikan yang didapat, digunakan, dan dikeluarkan akan termanaj dengan baik.[[12]](#footnote-12)

Berikut digambarkan siklus kegiatan manajemen sebagaimana dikemukakan oleh Segiovanni.[[13]](#footnote-13)



Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan manajemen diartikan sebagai suatu  runtutan  proses terdiri dari aktifitas perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam  mendayagunakan sumber daya organisasi.

1. **Konsep Pembiayaan**
2. **Pengertian Pembiayaan**

Biaya pendidikan adalah satu dari bagian komponen input yang begitu berarti pada peyelenggaraan pendidikan pada lembaga. Untuk meraih suatu target pendidikan, biaya pendidikan mempunyai posisi penentu. Dalam pendidikan biaya itu terdiri dari; (1) Biaya langsung (*direct cost*), meliputi berbagai biaya yang digunakan pada kepentingan dilaksanakannya pengajaran erta berbagai kegiatan belajar murid seperti halnya belanja sarana dan peralatan pembelajaran, gaji guru, biaya transportasi, baik yang dikeluarkan oleh wali murid/orang tua, siswa, ataupun pemerintah. (2) Biaya tak langsung (*indirect cost*) berbentuk penghasilan hilang (*earning forgone*) berupa kemungkinan biaya (*opportunity cost)* yang dikorbankan siswa selama belajar.

Pembiayaan merupakan satu dari sumber daya yang mendukung keefisienan serta keefektifan pada saat mengelola pendidikan secara langsung. Sekolah dituntut untuk mempu mengelola yaitu merancang, merealisasikan, menilai dan membuat pertanggugjawaban tata kelola data dengan adanya transparansi bagi pemerintah serta masyarakat. Strategi pembiayaan terdiri dari strategi rancangan, pelaksanaan, penilaian, dan feed back.[[14]](#footnote-14)

Manajemen keuangan merupakan suatu rangkaian aktifitas mengelola pendanaan melalui pendayagunaan potensi seseorang. Aktifitas itu diawali dengan rancangan anggaran hingga mengontrol dan mempertanggungjawabkan pembiayaan. Hasil dari jalannya pendidikan sekolah bisa diketahui di waktu mendatang perlu memperoleh pendanaan mencukupi yang sesuai dengan TAP MPR, dimana dijelaskan bahwa pendidikan itu tanggungjawab pemerintah masyarakat serta keluarga.[[15]](#footnote-15)

Sumber pembiayaan oleh pemerintah yaitu, untuk kepentingan pendidikan pemerintah pusat memberikan sebagian pemasukan negara, disamping itu Pemda memberikan juga sebagian pemasukannya untuk kepentingan pendidikan yang berasal dari pemasukan daerah itu sendiri maupun subsidi oleh pemerintah pusat. Dana pembangunan via dp guna merehab gedung, alat-alat laboratorium dan workshop, buku, inovasi pendidikan dan lain sebagainya.[[16]](#footnote-16)

Hasil dari perolehan dana dari orang tua/wali seperti SPP dialokasikan guna menyokong kegiatan seperti pelaksanaan pembelajaran, STTB, menggelar rapat, perbaikan sarana kegiatan siswa, kesejahteraan pegawai, supervisi dan pengelolaan.

Download dari sumber masyarakat baik sekolah negeri maupun swasta bantuan keuangan juga diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat dan alumni, bahkan untuk keseragaman perwujutan bantuan untuk pembinaan pendidikan dan pengajaran di berbagai tingkatan dan jenis sekolah negeri didasarkan pada instruksi bersama.

Menggunakan anggaran dan biaya seyogyanya berpegang pada asas hemat, tidak berlebih-lebihan, tepat guna serta relevansi terhadap kebutuhan teknis yang telah menjadi syarat, terencana dan teratur sebagaimana dalam rencana, program serta kewajiban dalam menggunakan potensi/produk dalam negeri selama mungkin untuk dilaksanakan. Dalam merumuskan anggaran harus mengindahkan predisposisi yang bisa mungkin saja terjadi di waktu akan datang semisal kenaikan imbalan/gaji dan laju inflasi. Disamping itu perlu memperhatikan adanya kemungkinan akan adanya kebijakan yang berubah.

Komponen pokok pada manajemen keuangan diantaranya: (1) Metode penganggaran; (2) Pembelajaran pergudangan serta Metode pendistribusian; (3) Metode akutansi keuangan; (4) Metode invest; (5) Metode pengecekan. Pada realisasinya, manajemen keuangan ini menggunakan prinsip pemisahan peran diantara fungsi otorisator, ordonator, erta bendaharawan. Otorisator merupakan pejabat berkewenangan memutuskan tindakan yang berakibat pada pemasukan serta pembelanjaan anggaran. Ordonator merupakan pejabat berkewenangan melaksanakan pengujian dan memberi instruksi pembiayaan setiap kegiatan yang dijalankan dengan dasar otorisasi yang ditentukan sebelumnya. Bendaharawan merupakan pejabat berkeberwenangan melaksanakan penerimaan, penyimpanan serta keluarnya dana atau berbagai surat bernilai lainnya dan harus membuat perhitungan dertaan pertanggungjawabannya.[[17]](#footnote-17)

1. **Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan**

SDM merupakan aspek yang urgen pada peningkatan pembangunan Negara, sehingga suatu negara perlu investasi di bidang pendidikan. Investasi itu dinyatakan dengan penyelenggaraan pendidikan formal atu pun nonformal. Guna memperoleh SDM bermutu maka dibutuhkan juga pendidikan yang dapat menunjang. Maka dari itu anggaran / pembiayaan bagi pendidikan begitu dibutuhkan sebab hal tersebut adalah satu dari faktor-faktor krusial dalam mendukung setiap jalannya pendidikan.

Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan aktivitas dan kegiatan di dalam suatu organisasi.[[18]](#footnote-18) Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung *(direct cost)* dan biaya tidak langsung *(indirect cost)*. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transpotasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung yang berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.[[19]](#footnote-19)

Pada dasarnya pembiayaan pendidikan adalah proses peruntukan kuota berbagai sumber di setiap program atau pelaksanaan kegiatan pendidikan atau pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perihal terkait pembiayaan pendidikan diantaranya rancangan anggaran, pendanaan pendidikan, realisasi anggaran pendidikan, akutansi, pertanggungjawaban, pengecekan serta kontrol anggran pendidikan.[[20]](#footnote-20)

1. **Standar Manajemen Pembiayaan**
2. Masyarakat sebagai sumber pembiayaan pendidikan

Masyarakat berperan sebagai salah satu sumber pemasukan atau pembiayaan lembaga. Sesuai pedoman rencana, memprogram serta menyusun anggaran, sumber biaya pendidikan yang bisa ditingkatkanpada anggaran pengeluaran lembaga diantaranya yaitu; anggaran pembangunan, anggaran rutin, dana pembantu pendidikan, donatur dan lainnya yang pandang sah bagi setiap pihak. Esensinya, secara garis besar sumber pemasukan dana di lembaga dapat kategorikan: (1), Pemerintah; (2), Orang tua; (3), Masyarakat bersifat mengikat ataupun tidak.

1. Kontribusi masyarakat dalam pendidikan dan pembiayaannya

Ikatan antara masyarakat dan sekolah merupakan suatu reaksi komunikasi antara keduanya yang bermaksud untuk berupaya menjadikan sekolah lebih maju. Maka dari itu sekolah memberi peluang bagi masyarakat guna dapat berpartisipasi pada pendidikan. Dasar hukum pendidikan tertera pada pasal 54 UU Sisdiknas. Partisipasi masyarakat pada pengembangan kualitas pelayanan pendidikan, diantaranya perancangan, pengeceka serta evaluasi kegiatan pendidikan.

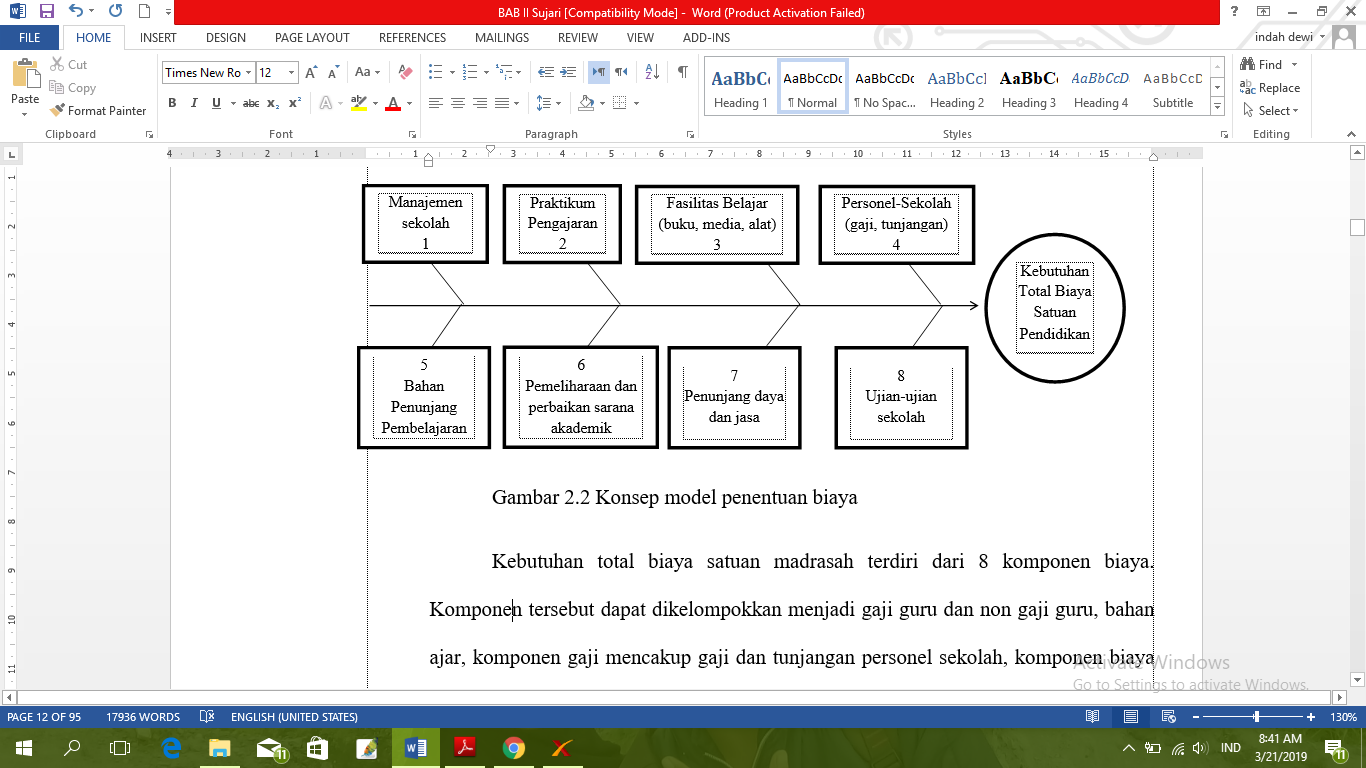
Terkait sistem pendidikan yang demokratis memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat dan penyelenggara pendidikan untuk berpartisipasi dengan lebih nyata. Masyarakat bukan lagi hanya menjadi subjek yang pasif akan tetapi menjadi subjek aktif dalam keseluruhan sistem pendidikan dengan ikut menentukan arah dan kebijakan, merumuskan strategis, sasaran, dan tujuan pendidikan serta ikut terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Strategi dasar yang ditempuh dalam pendidikan adalah dengan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan, sebab pada prinsipnya lembaga pendidikan merupakan jantung dan ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Lembaga pendidikan harus menjadi wadah yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga mereka merasa nyaman yang berdampak pada prestasi belajarnya dan juga berpengaruh terhadap mutu alumni.

Pembiayaan di setiap program keikutsertaan masyarakat diantaranya: perencanaan, kontrol, serta evaluasi kegiatan pendidikan tersebut, yakni disinergikan terhadap anggaran belanja dalam RAPBS sekolah jikalau secara langsing berkenaan dengan program sekolah. Akan tetapi program yang berupa kegiatan masyarakat/dewan pendidikan/komite sekolah dalam rangka kepentingan pendidikan secara tidak langsung bermaksud membagi kuota pada anggaran diluar RAPBS, dimana dananya dapat diperoleh dari masyarakat secara langsung.

1. Peran humas standar pembiayaannya

Dewasa ini humas dalam di setiap sekolah sangatlah terbatas untuk diperankan. Perihal ini disebabkan minimnya wawasan serta info yang punya oleh manajer/pengelola/pelaksana lembaga pendidikan itu. Terlebih pada lembaga pendidikan dalam payung pemerintah dari SD s.d. SMA. Terkecuali pada tingkat perguruan tinggi telah ada karyawan tersendiri yang mengatur humas atau disebut PR. Sebenarnya pada sekolah swasta atau dalam payung suatu yayasan mulai memanfaatkan humas dalam kegiatannya namun pelaksanaannya sering kali tidak maksimal. Terkait pembiayaannya, perihal ini adalah termasuk struktur pada lembaga pendidikan, sehingga harus dapar bersinergi terhadap kebutuhan.[[21]](#footnote-21)

Penentuan biaya dikelompokkan menjadi 8 komponen, yaitu sebagai berikut:



Kebutuhan total biaya satuan pendidikan meliputi 8 kategori komponen biaya meliputi; gaji guru serta non gaji guru, komponen biaya gaji yaitu gaji serta tunjangan karyawan lembaga, komponen biaya non-gaji guru meliputi manajemen lembaga, bahan ajar, sarana belajar, perbaikan serta perawatan, penunjang jasa dan daya, berbagai ujian/evaluasi di lembaga. Kategori komponen biaya ini merupakan komponen minimal yang harus dilaksanakan.[[22]](#footnote-22)

1. **Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaaan di sekolah harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan. Menurt Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Berikut ini bahasan masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktek-praktek penyelengaraan sekolah, baik yang dikelola secara konvensional maupun berbasis manajemen berbasis sekolah (MBS).

Pembiayaan pendidikan pada prinsipnya juga terdapat dalam ayat suci Al-Quran seperti pada firman Allah surat Al Mujadallah ayat 11-13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٢ ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَٰتٖۚ فَإِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٣

Artinya: *“11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, 12. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, 13. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [[23]](#footnote-23)*

Berdasarkan ayat tersebut mengingatkan kepada manusia bahwa: kita harus berlapang-lapanglah dalam majlis, Allah menaikkan derajad setiap orang yang beriman serta setiap orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kita dianjurkan mensedekahkan harta kepada fakir miskin dan melaksanakan shalat, membayar zakat, serta taat pada Allah dan Rasulullah. Allah Maha Mengetahui setiap yang dikerjakan

**Adapun prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan diuraikan sebagai berikut:**

**1) Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan. Kaitannya dengan manajemen yaitu terbuka pada pengelolaan setiap kegiatan. Pada lembaga pendidikan, transparansi manajemen keuangan yaitu terdapatnya keterbukaan dalam mengelola pendanaan lembaga itu, diantaranya terbuka dalam hal sumber serta jumlah keuangan, rincian pemakaiannya, dan adanya tanggung jawab yang jelas agar berbagai pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengetahui. Guna menambah dukungan orangtua/wali, pemerintah serta masyarakat, adanya transparansi pembiayaan begitu dibutuhkan pada penyelenggaraan setiap kegiatan pendidikan di lembaga. Selain itu transparansi bisa meningkatkan rasa saling percaya antara masyarakat, pemerintah, orang tua murid serta warga sekolah menggunakan informasi yang tersedia dan memastikan perolehan informasi tersebut mudah didapat secara memadai dan tepat.

Al-Qur’an menjelaskan kepada kaum muslin untuk menerapkan transparansi dan bersikap adil dan jujur, dimana adil dan jujur adalah kunci adanya transparansi. QS An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya*: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [[24]](#footnote-24)*

Berdasarkan ayat tersebut di atas Allah memerintahkan kepada manusia untuk menerapkan sikap adil, dan bersikap transparan terhadap keuangan yang dikelola karena Allah maha mendengar dan maha melihat. Informasi-informasi pembiayaan yang dapat diketahui bagi setiap warga sekolah serta orang tua murid seperti perencanaan penganggaran pemasukan dan pengeluaran sekolah atau RAPBS dapat di pajang pada tempat khusus informasi, ruang guru ataupun ruang TU agar informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh. Orang tua murid dapat melihat besaran penerimaan sekolah dari orang tua murid serta bagaimana penggunaannya. Informasi yang didapat orang tua murid tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pada lembaga.

**2)  Akuntabilitas**

Akuntabilitas pada manajemen pembiayaan yaitu pendayaguaan anggaran biaya sekolah bisa dilaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana rancangan yang ditentukan. Lembaga sekolah menggunakan anggaran biaya dengan tanggung jawab penuh sesuai dengan rancangan yang ditentukan serta aturan berlaku. Pertanggungjawaban tersebut bisa dilaksanakan terhadap setiap *stakeholder* semisal karyawan lembaga, orang tua/wali, pemerintah serta masyarakat. terdapat tiga substansi yang berperan sebagai prasyarat akuntabilitas dapat terlaksana, diantaranya terdapat **standar kerja, keterbukaan, dan keikutsertaan.** Akuntabilitas adalah pengembangan dari sikap tanggungjawab, perihal yang lebih bermutu dari pada tanggungjawab, karenanya dapat memberikan kepuasan seluruh *stakeholder*. Disamping itu akuntabilitas merupakan situasi seorang yang menjadi penilaian orang lain sebab mutu kerjanya dalam mempertanggungjawabkan tugas yang terselesaikan.

Sementara itu asosiasi peneliti pendidikan amerika (American Educational Research Associatiation dalam Murphy dan Louis (1999:467-471) merumuskan 6 jenis akuntabilitas, yaitu: bureaucratic, legal, professional, political, moral, dan market. Rumusan lain tentang jenis akuntabilitas ini dikemukaan oleh Neave (1987:72): ”...*the Issue of accountability in education may be seen us originating from rather wider political expression of concern which hitherto has been limited those infolved with the technical managerial and administrative aspect of education”*. Jadi, akuntabilitas yang dapat kita perhatikan adalah akuntabilitas keberhasilan, profesional, sistem, birokratis, legal (hukum), profesional, politik, moral, pasar, dan akuntabilitas teknis, manajerial, admistratif. Uraian terperinci dari masing-masing rumusan akan dijelaskan dibawah ini:

1. Akuntabilitas Keberhasilan
2. Akuntabilitas Profesional (Professional Accountability)
3. Akuntabilitas Sistem (System Accountability)
4. Akuntabilitas Birokrasi (BureaucraticAccountability)
5. Akuntabilitas Hukum (Legal Accountability)
6. Akuntabilitas Profesional (Professional Accountability)
7. Akuntabilitas Politik (Political Accountability)
8. Akuntabilitas Moral (Moral Accountability)
9. Akuntabilitas Pasar (Market Accountability)[[25]](#footnote-25)

Untuk mencapai tujuan lembaga yang diinginkan dan direncanakan maka lembaga memerlukan manajer yang berkapasitas tinggi sehingga bisa membuat rancangan terbaik, mengorganisasi, mengerahkan, mengawasi dan dapat melihat adanya kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman (strength, weakness, opportunity dan threat), karenanya seseorang yang menjadi pengelola lembaga pendidikan Islam haruslah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut: wawasan luas, sabar, kreatif, responsif, inisiatifdan cekatan. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Mujadalah ayat 11:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

Artinya*: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [[26]](#footnote-26)*

**3)  Efektivitas dan Efisien**

Sebagian besar perencanan pendanaan pada sekolah include dalam rumusan RAPBS yang dirancang denganefisien serta efektif.[[27]](#footnote-27) Selanjutnya, susilawaty menekankan bahwa RAPBS yang telah disusun dan dilaksanakan dapat diletakkan di tempat strategis agar orang tua murid dapat melihat perolehan biaya berikut penggunaannya, hal tersebut bertujuan bagi setiap yang membutuhkan info tersebut bisa mendapatkannya dengan mudah termasuk bagi orang tua murid agar dapat meningkatkan kepercayaan pada lembaga.[[28]](#footnote-28) Berdasarkan pendapat tersebut kerapkali efektif diterjemahkan dengan tercapainya target yang telah rumuskan, namun efektif itu lebih berfokus pada kualitas outcomes. Manajemen pembiayaan disebut mencukupi adanya asas efektivitas jika program yang dijalankan bisa mengelola keuangan untuk mendanai kegiatan yang dilaksanakan untuk meraih tujuan lembaga tertentu dan kualitas outcomes relevan terhadap rancangan yang telah ditentukan secara menyeluruh.

Ayat-ayat al-Qur’an yang dapat dijadikan acuan kedua hal tersebut adalah QS Surat al-Kahfi ayat 103-104 yaitu tentang efektif:

قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا ١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ١٠٤

Artinya*: “Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?*

*104. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.” [[29]](#footnote-29)*

Ayat-ayat al-Qur’an selanjutnya yang dapat dijadikan acuan adalah Surat Al-Isra, ayat 26-27 yaitu tentang efisien:

وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧

Artinya*: “26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” [[30]](#footnote-30)*

Berdasar ayat-ayat di atas memberikan petunjuk kepada manusia untuk senantiasa efisien terhadap pengeluaran. Keefisienan berkenaan dengan besaran hasil suatu program.  keefisienan merupakan parameter terbaik antara masukan dan keluaran (input dan out put) atau antara energi dan produk. Sepemikiran dengan Fattah bahwa dalam perumusan anggaran adalah dengan cara apa biaya dapat dimanfaatkan dengan efisien, membuat alokasi dengan seksama, relevasi terhadap rasio prioritas.[[31]](#footnote-31) Karenanya pada dalam proses merumuskan anggaran membutuhkan berbagai langkah sistematis serta relevan dengan peraturan berlaku. Yaitu undang undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.[[32]](#footnote-32)

Strategi dalam mengatur pembiayaan menuntut untuk bisa menjaga pemasukan yang didapat dan memanfaatkannya untuk mendanai kegiatan secara ekomomis, efektif, efisien, dan mewujudkan akuntabilitas pembiayaan bermutu. Pengaturan keuangan berkenaan dengan setiap kegiatan pendapatan dan pengeluaran biaya berikut penggunaan surplus dari hasil manajemen biaya itu. Pembiayaan adalah satu dari sumber daya yang menunjang kefisienan dan keefektifan tata kelola pendidikan secara langsung. Dan lembaga dituntut agar mampu merencanakan, merealisasikan dan menilai berikut pertanggungjawabannya kepada pemerintak serta masyarakat dengan terbuka.[[33]](#footnote-33)

Dalam memastikan menjamin ketercapaian upaya, maka pelaksanaan manajemen seyogyanya berlandaskan pada berbagai prinsip manajemen yang bisa dipahami oleh seorang pengelola meliputi:

1. prinsip alokasi kerja
2. prinsip otoritas serta tanggungjawabnya
3. prinsip teratur dan patuh
4. prinsip instruksi kesatuan
5. prinsip motivasi
6. prinsip kebenaran dan keseimbangan. [[34]](#footnote-34)
7. **Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan**
8. Biaya Uang Versus Biaya Oportunitas

Unit dari pendidikan bisa dihitung dalam bentuk biaya, dan bisa pula dihitung dari semua sumberdaya nyata yang dipakai selama proses pendidikan (guru/dosen, waktu siswa dan karyawan, buku, peralatan, materi, bangunan). Walaupun tidak bisa dihitung langsung berupa uang, namun sumberdaya tersebut mempunyai nilai sebab bisa dipakai pada aspek lain, karena itu disebut dengan *opportunity costs.*

1. Biaya Modal Versus Biaya Operasional/Rutin

Biaya operasional mengikuti seluruh pembelanjaan pada berbagai barang yang cepat habis konsumsi, contohnya alat tulis,bahan bakar serta berbagai jasa lain yang bisa menimbulkan *manfaat* pada jangka pendek atau menengah. *Capital Costs* (modal) atau *expenditure* (pengeluaran) terdiri dari pembelanjaan aset tahan lama (*durable asset*)contoknya gedung dan sarana yang dalam jangka panjang bisa menghasilkan keuntungan. Pembelanjaan berbagai barang *captal/modal* tersebut bisa disebut dengan investasi. Baik *current* atau *capitula expenditure* bisa dihitung secara *current prices* atau *actual* atau dalam taraf harga konstan/*constant purchasing power.*

1. Biaya rata-rata (AC) dan Biaya Marginal (MC)

Analisis biaya berkenaan dengan keseluruhan biaya pendidikan atau dengan biaya per sisiwa (*unit cost*). terdapat dua cara dalam mengukur *unit cost*:

1. Biaya rata-rata per siswa adalah biaya kesemuanya dibagi jumlah murid yang mendaftar di sekolah atau level tertentu;
2. Biaya rata-rata per lulusan yaitu biaya kesemuanya dibagi jumlah murid yang lulus.[[35]](#footnote-35)

Kategori biaya pendidikan dibagi menjadi 6 sebagai berikut:

* 1. Biaya langsung (*Direct Cost*)

Adalah biaya yang dibelanjakan oleh sekolah, murid atau wali murid dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung tersebut atas sepengetahuan para wajib pajak serta data tersedia di sekolah sehingga lebih mudah dihitung.

* 1. Biaya tidak langsung (*Indirect Cost*)

Berupa biaya hidup yang dibelanjakan untuk kepentingan sekolah oleh wali murid atau murid, biaya tersebut dibelanjakan tidak langsung dipakai oleh sekolah, namun dikeluarkan oleh anak atau orang yang menanggug biaya murid yang ikut pendidikan.

* 1. *Private Cost*

Adalah semua biaya yang dikeluarkan orang tua/wali murid untuk kesuksesan belajar anak. Seperti halnya orang tua mengluarkan uang untuk biaya bimbel/les private yang bertujuan agar anak tersebut lebih unggul dalam mapel/keahlian tertentu, contoh mapel bagasa inggris, komputer, matematika.

* 1. *Social Cost*

Adalah biaya yang dibelanjakan masyarakat, atas nama perorangan ataupun kelompok guna mendanai semua kebutuhan pembelajaran. Biaya tersebut diberikan oleh masyarakat pada penyelengaraan pendidikan sebagai bentuk keikutsertaan, sebab selain tanggungan pemerintah dan orang tua/wali, pendidikan juga merupakan tanggungjawab yang beriringan antara pemerintah, orang tua/wali dan masyarakat.

* 1. *Monetary Cost*

*Monetary cost,* disamping pengeluaran berupa uang, terdapat pula biaya yang dikeluarkan berupa tenaga, jasa, dan waktu, biaya seperti ini bisa dinilai serta disamakan dengan nilai uang.

* 1. Biaya Belajar

Biaya pendidikan yang ditanggung oleh murid pada tiap-tiap jenjang pendidikan tidak selalu sama jumlahnya, namun disesuaikan dengan jenis pendidikan contohnya PAUD/TK, SD/MI, SPM/MTs, SMA/SMK, biasanya meliputi:

1. Iuran murid
2. Biaya SKS persemester intra dan ekstra
3. Biaya peralatan, contoh buku dan ATK
4. Pengeluaran personal
5. Biaya yang hilang atau pendapatan yang mungkin diperoleh bila tidak sekolah
6. Bunga kumulatif tahunan (Deflasi) rata-rata 4% bagi jumlah setiap pengeluaran.[[36]](#footnote-36)
7. **Proses pengelolaan pembiayaan di sekolah**

Komponen pembiayaan dalam lembaga sekolah adalah faktor produksi beriringan dengan komponen lain-lainnya yang menjedi penentu terealisasinya program pembelajaran dan mengajar. Dapat dipahami bahwa sluruh program sekolah yang dijalankan membutuhkan pembiayan.[[37]](#footnote-37)

Pada tatanan penyelenggaraan metode mengelola mobilitas biaya yang dikeluarkan mulai dari merencana, mengorganisasi, melaksanakan mengontrol hingga *feed back*. Perencanaan merumuskan bagaimana, apa tujuannya, kapan, seberapa lama dan dimana akan selenggarakan. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Pelaksanaan meliputi siapa yang ikut serta, apa perannya, dan apa dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Pengawasan dan pengecekan mengurus kriteria, metode pelaksanaan serta pelakunya. Umpan balik meringkas berikut saran kontinuitas dijalankannya Menejemen Operasional Sekolah.[[38]](#footnote-38)

Tahap awal pada penetapan rencana pembelanjaan dana yaitu melakukan ananilisis terhadap aspek-aspek yang erat kaitannya dengan sistem perencanaan anggaran, dengan berlandaskan estimasi keadaan keuangan, *line of busines,* kondisi konsumen organisasi pengelola serta kemampuan para petingginya.

Sistem pengaturan keuangan sekolah yaitu: perumusan anggaran, strategi melacak sumber biaya, pemanfaatan keuangan, kontrol dan evaluasi terhadap anggaran, pertanggung jawabannya. Pendapatan dan pembelanjaan keuangan sekolah dikelola dalam perencanaan anggaran pemasukan dan pengeluaran sekolah/RAPBS. terdapat perihal yang berkaitan dengan perumusan RAPBS yaitu: pendapatan, pemakaian, pertanggung jawaban.[[39]](#footnote-39)

1. **Bentuk-Bentuk Desain Anggaran**

Anggaran memiliki fungsi dalam manajemen, yaitu perencanaan ataupun pengawasan. Maka dari itu, ketentuan pola anggaran adalah begitu berpengaruh. Karena bukan seluruh anggaran disusun untuk menjalankan fungsi manajemen.

Ada empat pola anggaran yang diikuti sekolah, diantaranya:

1. Anggaran Butir Per Butir (*Line Item Budget*)

Merupakan pola anggaran tersederhana dan sering dilaksanakan. Pada pola ini, semua pembelanjaan dikategorikan seperti upah, gaji dan honor dalam satu kelompok/nomor/butir, dan sarana, perlengkapan, material dalam satu kelompok/nomor/butir tersendiri.

1. Anggaran Program (*Program Budget System*)

Pola ini disusun untuk dapat mengenali biaya tiap kegiatan. Menghitung anggaran biaya per butir berdasarkan jenis butir (item) yang akan dibeli, dan pada anggaran program biaya dihitung sesuai dengan jenis program.

1. Anggaran Berdasarkan Hasil (*Performance Budget*)

Pola anggaran ini menegaskan hasil, bukan pada keterperincian dari alokasi anggaran.

1. Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (*PlaningProgramming Budgeting System*/PPBS atau SP4)

PPBS adalah sistematika kerja pada perencanaan melalui cara mengorganisassikan info serta melakukan analisis tersistem.[[40]](#footnote-40)

1. **Tujuan Analisis Biaya**
2. Dalam satuan jenjang, data biaya begitu deskriptif. Pembaruan tentang biaya gedung serta operasional lembaga, menyuguhkan pembelajaran dan pelatihan khusus adalah perihal utgen.
3. Mengungkapkan alternatif sumber-sumber daya lain yang mungkin dipergunakan.
4. Analisis mendalam pada data laporan pembiayaan bisa digunakan untuk fasilitas pengontrolan atas operasional internal praktik pendidikan. Pengawasan itu dibutuhkan untuk memastikan pemanfaatan biaya secara benar dan bijasana.

Akhirnya, unit data biaya meberikan sebuah masukan yang berarti bagi riset tertentu. Riset operasional yang dipandang sebagai studi menajemen ilmiah, mensyarakat terdapatnya data-biaya.[[41]](#footnote-41)

1. **Konsep Manajemen Pendidikan**

Konsep manajemen pendidikan adalah perihal yang begitu esensial dalam menjaga mutu pendidikan, setelah pengertian manajemen pembiayaan diketahui, pembahasan berikutnya adalah mengenai pendidikan terkait manajemen pendidikan yang menjadi suatu lembaga yang berkiprah pada sistem pengajaran, aktifitas penyaluran ilmu pengetahuan serta karakter dari pendidik terhadap peserta didik.

* 1. **Pengertian Pendidikan**

Pembahasan berikutnya adalah pengertian tentang pendidikan. Terdapat definisi yang tidak sedikit mengenai pendidikan oleh ahli-ahli diantaranya:

Pendidikan sari segi term-nya diambil dari kata awal didik, kemudian mendapat imbukan *men,* sehingga jadi *mendidik*, yang bermakna menjaga serta memberi ajaran. Disamping itu, pendidikan selaku kata benda yaitu kegiatan merubah sikap serta perangai orang atau kumpulan orang dengan tujuan mendewasakan orang tersebut dengan usaha edukasi dan bimbingan.

Rechay dalam bukunya*, planing for teaching*, *an introduction*, menjelaskan pengertian pendidikan sebagai berikut, “*the term education*” refers *to the broad function of preserving and improving the life of the group through brining new members into its shared concern. Education is trus a far broader social activity by which communities continue to exist. In complex communities, this function is specializer and institutionalizer in formal education, but there is always the education outside the school with which the formal process in related.*”

Pendidikan dalam istilahnya berkaitan dengan peran yang lebih besar dari pada penjagaan dan pengajaran kehidupan masyarakat, terlebih agar dapat memperkenalkan kepada generasi muda bagaimana dalam berperan dalam masyarakat tersebut dan mempertangungjawabkan perannya. Karenanya proses pendidikan memiliki peran lebih besar selain kegiatan PBM yang dilaksanakan di sekolah

Pendidikan yaitu suatu kegiatan di masyarakat yang memiliki peran merubah kondisi masyarakat kepada kondisi yang jauh lebih baik. Terdapat hubungan antara pendidikan dan kondisi masyarakat. Dalam pendidikan memiliki sistem institusionalisasi serta spesialisasi berdasarkan kebutuhan masyarakat yang modern dan berkembang. Secara unvirsal proses pendidikan di sekolah tidak bisa dijauhkan dari informasi yang berlangsung di luar sekolah. Maka dari itu, ada hubungan sangat signifikan antara keluarga, masyarakat serta lingkungan.

Istilah lain pendidikan yaitu *ta’lim* diambil dari *‘allama* artinya aktifitas perpindahan ilmu pengetahuan kepada individu tanpa terdapat sekat serta syarat (al-baqarah ayat 31) kata *ta’lim* adalah prosedur mengajarkan tanpa terdapatnya pengenalan mendasar. Term *ta’lim* sama dengan term *tarbiyah* maka *ta’lim* memiliki arti pengenalan tempat setiap sesuatu, sehingga artinya menjadi lebih umum daripada term *tarbiyah* karena *tarbiyah* hanya merujuk kepada keadaan eksternal bukan mencakup sisi pengetahuan.[[42]](#footnote-42)

Pendidikan memiliki fungsi yang urgen guna meningkatkan kualitas SDM. Pendiddikan memberikan pengaruh penuh terhadap perkembangan ekonomi bangsa. Pengaruh tersebut terletak pada fertilitas masyarakat, bukan pada produktivitas. Pendidikan membuat SDM menjadi lebih cepat memahami dan mempersiapkan diri menyongsong transformasi lingkungan kerja. Maka dari itu, bukanlah keanehan jika negara yang berpenduduk yang berpendidikan lebih tinggi akan dapat memiliki perkembangan ekonomi yang meningkat pula.[[43]](#footnote-43)

* 1. **Fungsi Manajemen Pendidikan**

Pada keberlangsungan proses pendidikan terdapat fungsi manajerial diantaranya:

1. Fungsi edukatif, yaitu pengajaran yang bermaksud menyampaikan ilmu pengetahuan bagi anak didik sehingga kebodohan terhindarkan.
2. Fungsi pengembangan, berpikir dewasa dengan adanya perpindahan ilmu pengetahuan.
3. Fungsi keyakinan pada sesuatu yang benar melalui pengetahuan ilmiah.
4. Fungsi religius, merupakan sisi pengabdian sebagai seorang hamba terhadap Tuhan memberikan anugrah kepada manusia berupa sempurnanya jasmani serta rohani. Agama yang mengatur peran, dimana semua agama mengharuskan untuk menuntut ilmu serta melepaskan diri dari sifat bodoh bagi umat.[[44]](#footnote-44)

Esensi manajemen pendidikan terdapat pada pengelolan sistem kependidikan. Maka dari itu, dan yang harus dikelola meliputi;

1. Kinerja karyawan;
2. Pengadministrasian program;
3. Tugas dan kewajiban pendidik;
4. Konsep dan tujuan pendidikan berupa kurikulum;
5. Prosedur serta metode pembelajaran;
6. Pengawasan dan supervisi pendidikan;
7. Evaluasi;
8. Aktifitas pembiayaan pendidikan pada aspek srpras, fasilitas, alat-alat pendidikan.[[45]](#footnote-45)

Dalam pengertian manajemen pendidikan sebagai proses pengelolaan dan pembinaan terhadap kelembagaan pendidikan, tersirat pula mengenai tugas-tugas para pendidik, yaitu;

1. Pengelolaan dalam arti pembimbingan;
2. Pengelolaan dalam arti menciptakan situasi untuk pendidikan yang bertujuan;
3. Pengelolaan dalam arti pengembagan kecerdasan pribadi para pendidik dan proses transmisi ilmu pengetahuan;
4. Pengelolaan dalam arti peningkatan dan memajukan lembaga pendidikan melalui kerja sama semua civitas akademik;
5. Pengelolaan dalam arti pengembagan dan pemahaman mendasar terhadap bakat dan minat anak didik ilmu pengetahuan; dan
6. Pengelolaan dalam arti penyulurkan dan pengembangan profesionalitas anak didik dalam kehidupan di masyarakat.[[46]](#footnote-46)

Terdapat proses sinergis pada manajemen pendidikan meliputi:

1. Proses pengarahan dan konsolidasi segala sesuatu, secara materiil, personal, spirituil dan yang berkaitan dengan bagaimana mewujudkan tujuan pendidikan.
2. Proses kesemua pelaksanaan program pada bidang pendidikan, diantaranya perumusan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengontrolan, pendanaan, dan pelaporan melalui pemanfaatan sarana yang ada, secara materiil, personal, ataupun spirituil atau mewujudkan target pendidikan dengan efisien dan efektif.
3. Proses bekerja bersama orang lain, guna berupaya mewujudkan target efektifnya pendidikan, maksudnya mencanangkan hasil yang tepat dan baik, sebagaimana yang telah ditetapkan.
4. Proses pelaksanaan kepemimpinan guna mewujudkan keefektifan kegiatan kerja sama dalam rangka terwujudnya target pendidikan.
5. Proses pelaksanaan seluruh program sekolah mulai dari berbagai upaya besar semisal penyusunan kurikulum, konsultasi, koordinasi, kesesuaian, mengawasi, dan sebagainya hingga pada berbagai upaya sederhana/kecil semisal mengawasi sekolah, menyapu halamaan, dan lain-lain.
6. Proses supervisi pendidikan
7. Proses pengawasan kinerja kependidikan.[[47]](#footnote-47)

Selanjutnya, Keberhasilan suatu lembaga pendidikan berhubungan dengan manajemen yang diterapkan, sebagai pemaknaan yang universial dari seni dan ilmu dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, personalia, dan profesionalitas. Dengan demikian, makna manajemen pendidikan adalah proses yang terus-menerus yang dilakukan oleh organisasi pendidikan melalui fugsionalisasi unsur-unsur manajemen tersebut, yang di dalamnya terdapat upaya saling memengaruhi, saling mengarahkan, dan saling mengawasi sehingga seluruh aktivitas dan kinerja organisasi pendidikan dapat tercapai sesuai dengan tujuan.[[48]](#footnote-48)

Tugas dan kewajiban pimpinan dalam lembaga pendidikan secara manajerial dapat dikelompokkan dalam tujuh kategori, yaitu mengelola;

1. Semua aktifitas pendidikan;
2. Aktivitas peserta didik;
3. Personal lembaga pendidikan;
4. Pengadminstrasian dan perkantoran lembaga pendidikan;
5. Perbendaharaan sekolah;
6. Pelayanan bantuan kependidikan;
7. Relasi lembaga pendidikan terhadap lingkungan masayarakat.[[49]](#footnote-49)

Pembahasan manajemen pendidikan berkenaan dengan perihal berikut:

1. Manajemen tentang tujuan pendidikan
2. Manajemen tentanga terpaduan antara ilmu dan seni dalam mengelola pendidikan
3. Manajemen sebagai proses yang sistematis, koordinatif, koopratif, integratif, dan taan azas manfaat.
4. Manajemen pengorganisasian kependidikan.
5. Manajemen dalam arti pelaksanaan fungsi-fungsinya secara konkret dalam aktivitas pendidikan.
6. Manajemen sebagai alat, metode, dan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan.[[50]](#footnote-50)

Dari berbagai uraian mengenai arti dan peran studi manajemen pendidikan di atas, ruang lingkup manajemen pendidikan dapat diklasifikasikan, terutama pada berbagai unsur yang wajib ada pada manajemen pendidikan merupakan ilmu, manajemen pendidikan mempunyai kerangka pikir dan dasar yang telah teruji, terlebih berkenaan dengan teori kepemimpinan, SDM, perilaku organisasi.[[51]](#footnote-51)

1. **Konsep Manajemen Pendidikan Islam**

Pendidikan Agama Islam dengan berbagai jalur, jenjang, dan bentuk yang ada seperti pada jalur pendidikan formal ada jenjang pendidikan dasar yang berbentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), jenjang pendidikan menengah ada yang berbentuk Madrasah Alyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan pada jenjang pendidikan tinggi terdapat begitu banyak Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dengan berbagai bentuknya ada yang berbentuk Akademi, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.

* 1. **Pengertian Manajemen Pendidikan Islam**

Dari berbagai pendapat yang sampaikan oleh para ahli tentang pendidikan Islam, dapat disimpulkan menjadi dua pokok:

* 1. Pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantakan ajaran dan nilai-nilai Islam.
  2. Pendidikan Islam merupakan sitem yang dijiwai, dikembangkan, disuport oleh nilai ajaran dalam Islam mencakup (1) pendidik/guru/dosen/kepala/tenaga kependidikan madrasah atau perguruan tinggi beserta berbagai komponen pendidikan selainnya, semisal metode, bahan ajar, tujuan, media, sumber belajar, dan lain-lain yang berciri atau bersumber dari ajaran Islam.[[52]](#footnote-52)

Manajamen pendidikan Islam mempunyai objek bahasan yang sangat bermacam-macam. Obyek-obyek tersebut bisa digunakan sebagai hal yang diintegrasikan sehingga dapat menciptakan manajemen pendidikan berkarakter Islami. [[53]](#footnote-53) Istilah Islam dapat dimaknai sebagai Islam wahyu atau Islam budaya. Islam wahyu meliputi Al-Quran, dan hadits-hadits Nabi, baik hadits Nabawi maupun Qudsi. Sementara Islam budaya meliputi ungkapan sahabat Nabi, pemahaman ulam, pemahaman cendekiawan Muslim dan budaya umat Islam. Kata Islamyang menjadi identitas manajemen pendidikan ini dimaksudkan dapat mencakup makna keduanya, yakni Islam wahyu dan Islam budaya.Oleh karena itu, pembahasan manajemen pendidikan Islam senantiasa melibatkan wahyu dan budaya kaum muslimin, ditambah kaidah-kaidah manajemen pendidikan secara umum.

Terdapat 3 landasan manajemen pendidikan Islam secara garis besar diantaranya: Al-Qur’an, As-Sunnah dan Atsaar serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[[54]](#footnote-54)

1. Al-Qur’an

Banyak ayat-ayat Al-Qur‟an yang bisa menjadi dasar tentang manajemen pendidikan Islam. Ayat-ayat tersebut bisa dipahami setelah diadakan penelahaan secara mendalam. Di antara ayat-ayat Al-Qur‟an yang dapat dijadikan dasar manajemen pendidikan Islam adalah QS. At-Taubah: 122 sebagai berikut:

۞وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ١٢٢

Artinya*: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” [[55]](#footnote-55)*

Berdasarkan ayat tersebut Allah memerintahkan bagi mukminin itu tidak pergi semuanya (ke medan perang). Bagi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam hal ini sebagian golongan dari tersebut adalah menempuh penddikan untuk memperoleh pengetahuan.

1. As-Sunnah dan Atsar

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya maka Allah akan mengekangnya dengan kekang berapi” ( HR. Ibnu Majah). Dan beliau juga bersabda: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqon (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (HR. Abu Qosim Sulaiman AtThabrani,)

1. Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 30 ayat 1 bahwa: “Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Disebutkan pula dalam Pasal 30 ayat 2 bahwa “Pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama” (UU sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003)[[56]](#footnote-56)

* 1. **Karakteristik Manajemen Pendidikan Islam**

Sebagai identitasnya terdapat sejumlan karekteristik yang dimiliki manajemen pendidikan Islam. Mujamil menerangkan karakteristik tersebut diantaranya: 1. berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis 2. MPI ditopang oleh empat sandaran, yaitu: teologis, teoritis, rasional, dan empiris. 3. MPI berciri theoantroposentris (berpusat pada Tuhan dan manusia) 4. MPI mengembangkan tujuan emansipatoris (membebaskan semua pelaku pendidikan dari keterpasungan) 5. MPI dilaksanakan dengan prosedur transformative, 6. MPI mengedepankan aktifitas kontruksi kepribadian muslim 7. Kesuksesan yang ingin dicapai oleh MPI merupakan penyatuan iman, amal, intelektual, akhlak, dan ketrampilan.[[57]](#footnote-57)

Manajemen pendidikan Islam memiliki prinsip khusus yang menjadi pembeda terhadap manajemen pendidikan secara umum. Prinsip tersebut adalah: tanggung jawab, amar ma’ruf nahi munkar, adil, Ikhlas, jujur, akhlak, iman dan relasi yang baik.

Menurut Ramayulis pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. [[58]](#footnote-58)

Sesuai dengan pendapat-pendapat ahli, maka manajemen pembiayaan pada penelitian ini meliputi perencanaan anggaran, pendanaan pendidikan, realisasi anggaran tersebut, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan dengan indikator 1) anggaran (*planning*), 2)Sumber Dana, 3) Pelaksanaan Anggaran Pendidikan, 4) Akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, 5) pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan yang belum dilakukan pada penelitian terdahulu.

1. **Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

Manajemen pendidikan merupakan suatu pengaturan sektor subjek pendidikan yang dilaksanakan dengan adanya kegiatan merencana, menganggarkan, mengorganisir, mengkomunikasi, menyemangati, mengontrol, mengendalikan, menilai serta mempertanggungjawabkan dengan teratur sehingga tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara bermutu. Adapun target dalam manajemen sehingga aktualisasi suatu kegiatan pendidikan dan suatu upaya bisa terstruktur dengan sistematik dan bisa dilaksanakan evaluasi dengan lengkap dan akurat karenanya target yang dirumuskan dapat terwujud secara efektif, bermutu, produktif, serta efisien.

1. **Perencanaan Anggaran Pendidikan**

Perencanaan adalah merupakan perumusan tujuan organisasi, menyusun strategi untuk mewujudkannya, dan mengembangkan rancangan program kerja organisasi. Dari kesemua proses manajemen, perencanaan adalah perihal paling urgen sebab tanpa adanya perencanaan akan menghambat jalannya aspek manajemen selanjutnya yakni proses mengorganisasi, menggerakkan, dan mengontrol. Perencanaan memuat rancangan berbagai program yang diperlukan dalam mewujudkan tujuan yang ditentukan. Perencanaan memperlihatkan bagaimana haluan suatu kerja dilaksanakan dan mengawasinya sehingga pengelolaan kinerja bisa dilaksanakan dengan efektif efisien.[[59]](#footnote-59)

Bidang pendidikan juga memerlukan perencanaan. Perencanaan pendidikan yaitu implementasi logis dari analisa terstruktur aktifitas pertumbuhan pendidikan dengan maksud agar pendidikan itu tersellenggara dengan efisien dan efektif serta relevan terhadap keperluan serta tujuan para murid berserta masyarakatnya. Perencanaan pendidikan adalah investasi pendidikan yang bisa dilakukan dan aktivitas pembangunan lain yang berprgang pada pertimbangan biaya, ekonomi dan keuntungan sosial. [[60]](#footnote-60)

Merencanakan itu adalah menetapkan program yang akan dijalankan diwaktu mendatang. Program tersebut berguna dalam mengatur semua sumber daya sehingga target yang diraih relevan dengan harapan.[[61]](#footnote-61) Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya apa harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan sering juga disebut jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi masa yang akan datang.

Sebenarnya perencanaan itu runtutan aktivitas dalam mempersiapkan ketetapan tentang apa yang diinginkan akan terwujud (kejadia, kondisi, situasi, dan sebagainya) dan apa yang akan dilaksanakan (substitusi, intensifikasi, kreasi, revisi, renovasi, eksistensifikasi, dan lainnya). Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan menduduki peran utama dan pertama diantara peran lainnya. [[62]](#footnote-62)

Hal diatas sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Hasyr: 18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [[63]](#footnote-63)*

Ayat-ayat lain yang berhubungan dengan perencanaan adalah dalam QS. Al Isra’ (17) ayat 36 sebagai berikut:

وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٦

Artinya*: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” [[64]](#footnote-64)*

Berdasar kedua ayat di atas memberikan gambaran tentang perencanaan. Terdapat faktor esensial yang tersemat pada perencanaan pendidikan:

1. Analisis rasional dan sistematis pada perencanaan pendidikan, hal ini menyangkut proedur perencanaan.
2. Aktifitas pembentukan dan peningktan pendidikan, maksudnya bahwa perencanaan pendidikan itu dilaksanakan guna pembaruan pendidikan yaitu aktifitas menuju kepada peningkatang yang kehendak.
3. Prinsip kefektifan serta keefisienan, maksudnya merumuskan pemikiran yang strategis, seperti pada mendapatkan berbagai sumber pembiayaan, alokasinya, hubungan pendidikan dengan tenaga kerja, hubungan peningkatan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Keperluan dan target murid serta masyarakat maksudnya perencanaan meliputi faktor eksternal dan internal dari sistem organisasi pendidikan.[[65]](#footnote-65)

Secara konseptual bahwa perencanaan pendidikan itu sangat ditentukan oleh cara, sifat dan proses pengambilan keputusan sehingga nampaknya dalam hal ini terdapat banyak komponen yang ikut berproses di dalamnya. Adapun komponen-komponen yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan ini, antara lain:

1. Tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan.
2. Masalah strategi adalah termasuk penanganan *policy* (kebijakan) secara operasional yang akan mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan.[[66]](#footnote-66)
3. Jenis dan tingkatan kemajuan negara apakah negara berkembang atau negara terbelakang atau negara industri maju. Karena dari beberapa sifat negara tersebut, terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan.[[67]](#footnote-67)

Perencanaan pendidikan terdiri atas beberapa jenis, tergantung dari sisi mana dilihatnya. Dari tinjauan tataran dan cakupannya, perencanaan pendidikan ada yang bersifat makro dan ada pula yang bersifat daerah atau regional, ada juga yang bersifat lokal dan ada pula yang bersifat kelembagaan atau institusional bahkan operasional.[[68]](#footnote-68)

Perencanaan memiliki tujuan untuk menghubungkan antara apa yang ada pada saat ini dengan apa yang diharapkan diwaktu mendatang. Perbedaan antara keduanya yaitu memberi bahan rancangan dalam menentukan target yang ingin diwujudkan pada pendidikan. Karenanya, perencanaan pendidikan merupakan aktifitas yang rumit sesuai dengan kerumitan permasalahan dalam pendidikan.

Berikut dijelaskan beberapa bentuk model-model anggaran pendidikan sebagai berikut:[[69]](#footnote-69)

1. Anggaran butir-per butir ( *Line Item Budget*)

Anggaran butir per butir merupakan bentuk anggara; konvensional, namun paling simpel dan banyak digunakan.

Kelebihan:

* Lebih simpel
* Mudah dalam pengawasan pengeluaran biaya.

Kelemahan

* Tidak membantu dalam pengambilan keputusan seperti mengevaluasi harga (unit cost) dalam hubungannya dengar pencapaian suatu program.
* Tidak akan dapat menunjukkan hubungan antara masukan program dengan keluaran.
* Tidak bisa menganalisis untung rugi (*cost benefit analisis*).
* Lebih mengarahkan pada pembukuan dan tidak terhadap tujuan suatu program

2) Anggaran Program (*Program Budget System*)

Bentuk anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Anggaran program dihitung berdasarkan jenis program. Sebagai bahan perbandingan kalau dalam anggaran butir per butir disebutkan gaji guru (item 01), sedangkan dalam anggaran program disebut gaji untuk perencanaan pengajaran IPA sebagai salah satu komponen, dan komponen lain yang termasuk program percobaan mencakup alat-alat IPA, bahan-bahan kimia, IPA dan \_sebagainya menjadi satu paket namanya Gaji guru program IPA. Adapun Keuntungan Bentuk Anggaran Program Mengorganisasikan sejumlah besar pengeluaran menjadi rencana Yang logis dan konkrit:

3) Anggaran Berdasarkan Kinerja (*Performance -Based Budget*) .

Bentuk ini sesuai namanya menekankan pada kinerja (performance) dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi. Pekerjaan dalam suatu program dipecah dalam bentuk beban keria dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya dapat dipegunakan untuk mencapai tujuan suatu program. Anggaran berdasarkan hasil ini merupakan alat manajemen yang dapat mengidentifikasi secara jelas satuan dari hasil suatu program dan sekaligus merinci butir perbutir dari kegiatan yang harus dibiayai. Bentuk ini menuntut akuntansi yang teliti dan pemroses data yang akurat. Hal ini mengakibatkan sistem ini menjadi mahal terutama bagi lembaga keciI/belum berkembang.

4) PPBS/ SP4 (*Planning Programing Budgeting System*] Sistem perencanaan Penyusunan program & pengangaran)

Bentuk ini dipopulerkan oleh Robert McNamara tahun 1960 di AS. PPBS/SP4 merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam PPBS tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

5) Anggaran Berbasis Nol (*Zero Based Budget/ZBB*)

Bentuk pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi.

Dalam penyusunan RAPBS harus memperhatikan beberapa hal yaitu mengaplikasikan asa anggaran berimbang maksudnya rancangan pemasukan serta penawaran harus seimbang, mengupayakan agar tidak terdapatnya minus pada pemasukan. Hal tersebut bertujuan membuat keberlangsungan sekolah menjadi kokoh dan solid pada bidang keuangan, karenanya pengelolaan keuangan perlu adanya sentralisasi pada bendahara sekolah guna memudahkan pelaksanaan tanggung jawab pada keuangan.

**Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan :**

1. Perencanaan interdisipliner, karena pendidikan sesungguhnya interdisipliner terutama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia.
2. Perencanaan itu fleksibel dalam arti tidak kaku tetapi dinamis serta responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan karena itu planner perlu memberikan ruang gerak yang tepat terutama dalam penyusunan rencana.
3. Perencanaan itu objektif rasional dalam arti untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat saja.
4. Perencanaan itu tidak dimulai dari nol tetapi dari apa yang dimiliki hal ini berarti segala potensi yang tersedia merupakan aset yang perlu digunakan secara efisien dan optimal
5. Perencanaan itu wahana untuk menghimpun kekuatan kekuatan secara terkoordinir, dalam arti segala kekuatan dan modal dasar perlu dihimpun secara terkoordinasi kan untuk digunakan secara mat mungkin untuk kepentingan pembangunan pendidikan.
6. Perencanaan itu disusun dengan data perencanaan tanpa data tidak memiliki kekuatan yang tepat dapat diandalkan.
7. Perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri tidak berdasarkan pada kekuatan orang lain, karena perencanaan yang berdasarkan kepada kekuatan bangsa lain akan tidak stabil dan mudah menjadi objek politik politik bangsa lain.
8. Perencanaan itu komprehensif dan ilmiah dalam arti mencakup aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematis dengan menggunakan prinsip dan konsep keilmuan.[[70]](#footnote-70)

Adapun kriteria perencanaan yang baik dikemukakan oleh siagian tahun 2008:90-91 menyatakan bahwa kriteria perencanaan yang bagus yaitu rencana 1) harus memudahkan diraihnya tujuan yang sebelumnya ditetapkan; 2) harus disusun oleh tenaga yang sangat paham akan target yang ditetapkan; 3) harus disusun oleh tenaga yang sangat mengerti akan metode perencanaan; 4) harus diikuti oleh perincian yang cermat; 5) tidak diperkenankan rencana diluar pemikiran pelaksanaan; 6) harus secara sederhana; 7) jangkauan luas; 8) terdapat alternatif pada resiko; 9) harus praktis (pragmatis); dan 10) harus berupa *forecasting.[[71]](#footnote-71)*

**Tahap-tahap Perencanaan Penganggaran**

Dalam perencanaan penganggaran memerlukan proses yang bertahap. Tahap-tahap perencanaan memuat rumusan dari berbagai tindakan yang dirasa dibutuhkan dalam mewujudkan hasil yang diharapkan sesuai rancangan yang ditentukan. Tahap-tahapan perencanaan yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi adalah:

* 1. *Forecasting* (peramalan)

Peramalan merupakan kegiatan memperkirakan, mengantisipasi, atau memperkirakan terhadap setiap hal yang mungkin terjadi di waktu mendatang sebelum rencana yang lebih pasti dilakukan.

* 1. *Establishing objective* (penetapan tujuan)

Sesuai dengan perkiraan dengan proyeksi tersebut, maka dapat diidentifikasi setiap tujuan yang hendak diwujudkan. Pengelompokan tujuan itu memiliki banyak macamnya sesuai dengan aspek keperluan, lingkup, jangkauan, dan jenjang lembaga pendidikan. Penentuan target adalah suatu kegiatan guna menentukan perihal yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan kinerja. Tujuan pendidikan sekolah dalam hal ini tercermin pada visi dan misi sekolah.

* 1. *Policy* (perumusan kebijakan)

Merupakan rancangan kebijakan. program yang dilaksanakan dalam langkah ini yaitu dengan mengenali berbagai program yang ada di sekolah. Kegiatan yang diidentifikasi di sekolah, bisa merupakan kegiatan yayasan (jika sekolah swasta), kegiatan kepala sekolah, kegiatan guru, kegiatan peserta didik, kegiatan orangtua dan kegiatan masyarakat. Semua kegiatan tersebut adalah yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan sekolah.

* 1. *Programming* (pemrograman)

Merupakan pemilihan atas berbagai program telah dilakukan tahap polisi (perumusan kebijakan)

* 1. Prosedur merumuskan langkah-langkah

Prosedur yang dimaksud disini adalah menyusun berbagai tahapan yang berguna pada program-program yang sudah dipilih pada tahap programing atau pengurangan tersebut diurutkan mana yang kudu dilakukan terlebih dahulu dan mana yang harus dikemudiankan.

* 1. *Developing procedure* (pengembangan prosedur)

Mengembangkan prosedur kegiatan dengan memformulasikan dan mengembangkan metode yang dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pengembangan prosedur dilaksanakan dengan menerapkan standar normal pelaksanaan kegiatan

* 1. *Scheduling* (penjadwalan)

Schedule adalah kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan tersebut. Jadwal ini perlu dibuat agar kegiatan-kegiatan yang sudah diurutkan, pelaksanaannya menjadi konkret, kapan dilaksanakan, dan siapa saja yang bertanggung jawab, serta siapa yang terlibat di dalamnya.

* 1. *Budgeting* (penganggaran)

*Budgeting* yang dimaksud disini adalah penganggaran atau pembiayaan. Ada dua aktivitas dalam penganggaran, yaitu penentuan sumber anggaran dan alokasi anggaran.[[72]](#footnote-72)

Adapun tahapan perencanaan menurut pakar lainya yaitu:

1. Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran.
2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin dan material.
3. Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
4. Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati.
5. Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambilan keputusan) dalam tahap ini dilakukankompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan secara objektif dan subjektif.

Pemnyusunan anggaran dibutuhkan sebagai rumus dalam perencanaan keuangan, berperan mendayagunakan berbagai sumber dengan tepat waktu, bisa digunakan sebagai media pengawasan serta evaluasi hingga tingkat keefektifan dan kefisienan aktifitas terwujud.[[73]](#footnote-73) Posisi perencanaan pendidikan, sistem yang berlaku pada pendidikan yaitu *organized effort* yang berfungsi sebagai aset dalam program pengembangan pendidikan. Melalui sistem pendidikan itulah semua program perencanaan seyogianya dilaksanakan, dan melalui sistem itu pulalah seluruh upaya pembangunan pendidikan itu diwujudkan.[[74]](#footnote-74)

Ada langkah perencanaan serta proses pada fase yang lebih rasional dan sederhana sebagaimana berikut: [[75]](#footnote-75)

1. *Need Assesment* (perlu pengkajian)

Artinya kajian terhadap kebutuhan yang mencakup aspek pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan, keberhasilan, kesulitan, kekuatan, kelemahan, sumber-sumber yang tersedia, sumber-sumber yang perlu disediakan, aspirasi rakyat yang berkembang terhadap pendidikan, harapan, dan cita-cita yang merupakan dambaan masyarakat.

1. *Formulation of goals and objective* (perumusan tujuan dan sasaran)

Perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang merupakan arah perencanaan serta merupakan penjabaran operasional dari aspirasi filosofis masyarakat.

1. *Policy and Priority Setting* (pengaturan kebijakan dan prioritas)

Penentuan dan penggarisan kebijakan dan prioritas dalam perencanaan pendidikan sebagai muara *need assesment*.

1. *Program and Project Formulatioan* (program dan perumusan proyek)

Rumusan program dan proyek kegiatan yang merupakan komponen operasional perencanaan pendidikan.

1. *Feasibility* (kelayakan)

Dengan melalui alokasi sumber-sumber yang tersedia dalam hal ini terutama sumber dana.

1. *Plan Implementation* (merencanakan implementasi)

Pelaksanaan rencana untuk mewujudkan rencana yang tertulis ke dalam perbuatan atau *actions*.

1. *Evaluation and Revision for Future Plan* (evaluasi dan revisi untuk rencana masa depan)

Kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana yang merupakan feedback untuk merevisi dan mengadakan penyesuaian rencana untuk periode rencana berikutnya.

Pentingnya perencanaan, perencanaan dipandang penting dan diperlukan bagi suatu organisasi antara lain dikarenakan:

1. Terdapatnya acuan bagi pelaksanaan berbagai program yang mengarah pada tujuan pengembangan.
2. Dapat memperkirakan berbagai potensi dan prospek kemajuan lembaga namun juga memperkirakan hambatan beserta resiko.
3. Memberikan kesempatan memilih alternatif terbaik terkait strategi.
4. Dapat merumuskan skala prioritas
5. Dapat menjadi barometer untuk melaksanakan kontrol dan evaluasi.[[76]](#footnote-76)

Tahapan-tahapan pada perencanaan pendidikan pada prinsipnya pada semua tataran sistemnya (operasional, institusional, dan struktural) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mendefinisikan permasalahan perencanaan pendidikan;
2. Analisis bidang telaah permasalahan perencanaan;
3. Mengkonsepsikan dan merancang rencana;
4. Evaluasi rencana;
5. Menentukan rencana;
6. Implementasi rencana;
7. Evaluasi implementasi rencana dan umpan baliknya.

Sesuai prinsip dalam islam terkait perencanaan tidak dapat menjamin bahwa tak ada orang yang bisa meramal waktu akan datang dengan pasti. Maka dari itu, sebaik apapun orang meramal, tidak diperkenankan untuk merencanakan suatu ketidakpastian. Dan apabila rencana tersebut disusun dengan tepat, tetaplah menyiapkan alternatif perencanaan, sehingga perlu mempunyai kreatifitas serta fasilitas untuk dapat menyelaraskan terhadap kondisi yang dapar berubah-ubah.[[77]](#footnote-77)

Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu (Nanang Fattah, 2000). Budget may be defined as the financial plan for the future, usually for one year but posbly a longer od shorter period of time, (Thomas H. Jones, 1985:22). Sementara kalau anggaran sektor publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kedalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas, (Freeman dalam Deddi Nordiawan, 2006:48).[[78]](#footnote-78)

Fungsi anggaran pada pengelolaan kekayaan suatu organisasi publik adalah organisasi berharap dalam memberikan pelayaan terbaik terhadap masyarakat namun hal tersebut kerap kali terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dipunya, karena itu anggaran mempunya peran fungsinya begitu berarti. Anggaran bisa disebut dengan penjelasan tentang perkiraan kinerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu dan ukuran finansial tertentu. [[79]](#footnote-79) Penganggaran sektor publik berbeda dengan perusahaan swasta. Karena penggangaran sektor publik lebih banyak muatan politis sedangkan perusahaan swasta relatif lebih kecil muatan politisnya. Selain itu bagi sektor publik anggaran tidak hanya sebagai sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Keuangan adalah perihal yang sensitif, maka dibutuhkan kehati-hatian dan kecermatan dalam pengelolaannya. Maka dari itu dalam menerima uang serta pemanfaatannya dibutuhkan adanya pencatatan yang benar dan teratur, pengatur pembiayaan tersebut, harus dilatih bagaimana melaksanakan pembukuan pembiayaan sekolah, prosedur pemanfaatan biaya, dan pertanggung jawaban.[[80]](#footnote-80) Di jenjang satuan pendidikan, biaya pendidikan didapatkan dari subsidi Pemerintah Pusat, Pemda, pembayaran dari murid serta donasi masyarakat yang tercatat pada RKAS, kebanyakan biaya pendidikan pada jenjang sekolah bersumber dari pemerintah pusat, dan sekolah swasta bersumber dari yayasan dan para murid.[[81]](#footnote-81)

Untuk mengetahui kekuatan keuangannya tentu saja salah satu faktor yang harus diperhitungkan adalah sumber dana biasanya sumber dana yang didapat dari:

1. pemerintah
2. orang tua murid
3. masyarakat
4. lulusan
5. anggota kegiatan
6. wirausaha lembaga pendidikan

Berfungsinya sumber dana tersebut, dalam administrasi keuangan akan sangat membantu kinerja organisasi. Sehingga dengan terbantunya dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan, tentu saja menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lembaga pendidikan persekolahan dalam pengelolaan keuangannya.Sejalan dengan pendapat tersebut, Sumber-sumber keuangan sekolah diperoleh dari beberapa sumber menurut Daryanto dan Muhammad Farid yaitu:

* 1. Dana dari pemerintah

Dialokasikan dengan alur penganggaran rutin pada daftar isi kegiatan (DIK) yang diberikan bagi etiap sekolah tiap periode tahun anggaran. Biasa dikatakan dengan dana rutin. Jumlahnya yang dianggarkan pada DIK ditetapkan sesuai dengan jumlah murid kelas I, II, III. Poin berta besaran anggaran biasa bagi setiap macam pengeluaran telah ditetapkan pemerintah di DIK.

* 1. Dana dari orang tua/wali murid

Pemasukan bersumber dari masyarakat disebut dengan iuran komite. Besaran biaya yang dikeluarkan oleh orang tua/wali murid ditetapkan kesepakatan komite sekolah, biasanya dana komite meliputi:

1. Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah.
2. Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama 3 tahun menjadi siswa ( pembayarannya dapat diangsur).
3. Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.
   1. Dana dari masyarakat

Dana tersebut kebanyakan berupa donasi tak mengikat/sukarela dari warga masyarakat yang memperhatikan terhadap program pendidikan pada sekolah tertentu. Hal ini disebabkan adanya simpati untuk dapat memberikan bantuan demi pendidikan yang lebih maju. Baik dana itu disumbangkan oleh individu, kelompok, badan usaha, atau yayasan tertentu.

* 1. Dana dari lulusan

Bantuan alumni ini bukan selalu dalam bentuk uang bisa berupa perlengkapan pembelajaran, buku, atau alat lain yang dapat menunjang peningkatan kualitas lembaga. Dan bantuan yang berupa dana dikumpulkan dari alumni-alumni bersifat bantuan tak mengikat/sukarela dari alumni yang tergerak berpartisipasi memajukan dan mengembangkan pendidikan di sekolah. Dana tersebut bisa diterima dari alumni secara langsung ataupun melalui even/program tertentu.

* 1. Dana dari anggota kegiatan

Dana ini diperoleh dari siswa/masyarakat yang mengikuti layanan program pendidikan ekstra/ekstra kurikuler, contohnya: les bahasa inggris pelatihan komputer, dan bidang keterampilan lain.

* 1. Dana dari kegiatan wirausaha lembaga pendidikan

terdapat sekolah-sekolah yang menyelenggarakan program usaha yang bertujuan untuk menambah pemasukan. Dana tersebut adalah hasil dari etiap program wirausaha yang dikelola oleh sekolah melalui tenaga karyawan sekolah ataupun para murid itu sendiri contonya; kantin, print dan fotokopi, koperasi, even bazar, dll.[[82]](#footnote-82)

Adapun dimensi pengeluaran meliputi: pembiayaan rutin, yaitu biaya yang mesti dibayarkan di tiap tahunnya, contohnya gaji karyawan (guru dan tenaga lain), pengeluaran operasional, perawatan sarana prasarana dan berbagai alat lain (benda habis pakai). Biaya pembangunan, misalnya adalah biaya perluasan/pembelian tanah, perbaikan gedung, pendirian gedung, pengadaan furniture, dan pembayaran lain untuk barang tidak habis pakai.[[83]](#footnote-83)

1. **Pelaksanaan (Implementasi) Anggaran Pendidikan**

Pelaksanaan Anggaran Pendidikan merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Pada Pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan agar dana pendidikan ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pelaksanaan dana pendidikan sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, namun dana tersebut tidak termasuk dalam penyertaan modal.

Dalam merealisasikan anggaran pendidikan, perlu melaksanakan program accounting atau pembukuan. Pembukuan meliputi dua hal; pengelolaan yang terkait otoritas menetapkan kebijakan pada penerimaan atau pengeluaran biaya, berikut tindak lanjut yang dilaksanakan, apakah diterima, dikeliarkan ataupun disimpan.

Berikut bentuk pemanfaatan dana aspek pendidikan:

1. Perbaikan lokal kelas/gedung sekolah;
2. Perbaikan/pengadaan kamar mandi/WC, sumber dan sanitasi air bersih;
3. Perbaikan/pengadaan mebelair ruangan kelas dan perpustakaan;
4. Perbaikan/pengadaan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga;
5. Pengembangan kualitas sekolah berupa penyediaan/pengadaan sarana prasarana dan fasilitas perpustakaan, UKS, Lapangan olahraga.
6. Serta unsur-unsur penunjang dalam bidang pendidikan yang lain.

Pengelolaan dipandang efektif jika mengacu pada rancangan anggaran pemasukan dan pengeluaran sekolah / RAPBS dalam setahun pelajaran, para kepala sekolah berbarengan dengan semua pemegang peran pada sekolah secara umum menggunakan cara-cara berikut:

1. Menyusun program sekolah agar dapat mewujudkan target yang diharapkan di tahun pelajaran yang berkaitan
2. Melaksanakan pendataan kegiatan serta memperkitakan hitungan keperluan dana penunjang
3. Melaksanakan pengkajian ulang terhadap kegiatan awal sesuai prospek ketersediaan dana pendukung yang bisa dikumpulkan.
4. Menentukan skala prioritas pada program yang akan dijalankan di tahun pelajaran yang berkaitan
5. Menghitung dengan rinci penggunaa uang yang ada untuk setiap program
6. Rincian perhitungan-perhitungan itu dimasukkan dalam format tertentu yang telah ditetapkan untuk dimanfaatkan oleh sekolah
7. Dokumen RAPBS disahkan oleh instansi memiliki kewenangan

Adanya dokumen tertulis tentang RAPBS yang tersedia itu, kepala sekolah dapat dengan terbuka membicarakan dengan setiap pihak yang membutuhkan. Secara umum pengeluaran dana yang dikumpulkan oleh sekolah meliputi 5 kelompok pembayaran meliputi:

1. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana pendidikan
2. Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar
3. Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan
4. Dukungan biaya sekolah dan peningkatan personil
5. Kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3.[[84]](#footnote-84)

Anggaran sekolah biasanya yang menjadi pengelola adalah kepala sekolah, namun dapat juga dikelola oleh guru yang kompeten pada hal tersebut atau anggota komite sekolah. Di sekolah lain yang lebih berkembang, dimungkinkan terdapat pihak tersendiri yang bertanggungjawab pada tata kelola sebagian anggaran. Secara khusus, pengawasan anggaran meliputi rentetan program pengecekan dan persetujuan untuk meyakinkan bahwa:

1. Keuangan dikeluarkan sesuai rancangan
2. Terdapat kelonggaran dalam menyusun anggaran guna membayar pajak
3. Pengeluaran dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang ada
4. Biaya tidak dikeluarkan untuk program yang tanpa persetujuan atau diberikan bagi penerima dengan tidak ada persetujuan.[[85]](#footnote-85)

Dibawah ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pihak sekolah dalam mengalokasikan dana dan PBM.

1. Jumlah orang yang ikut serta.
2. Jumlah materi yang dipakai.
3. Sarpras yang dipakai.
4. Waktu penyelenggaraan.
5. Jasa dan daya yang mendukung.[[86]](#footnote-86)

Selanjutnya dijelaskan mengenai biaya operasional, adapun yang dimaksud biaya operasional adalah:

Total Biaya Operasional = Biaya Langsung+ Biaya tidak langsung

Biaya pendidikan langsung yaitu biaya yang dibelanjakan guna keperluan input yang terkait dengan PBM secara langsung. Satuan biaya pendidikan langsung disini meliputi pembelanjaan untuk gaji guru dan tenaga kependidikan, sarpras, ATK, perawatan atau pendirian gedung untuk pendidikan.

Biaya pendidikan tidak langsung yaitu biaya yang dibelanjakan pada berbagai program yang tidak berhubungan langsung terhadap kegiatan PBM, namun dapat mendukung PBM. Satuan biaya pendidikan tidak langsung diantaranya yaitu biaya transportasi, kesehatan, buku dan ATK yang dikeluarkan oleh siswa, over head sekolah, pemerintah daerah dan pusat.

Tahap selanjutnya yaitu menentukan satuan biaya tiap siswa. Biaya satuan adalah ukuran yang mendeskripsikan sebesar apa dana yang wajib diberikan ke sekolah guna keperluan setiap murid dalam rangka mengenyam pendidikan yang merupakan beban pemerintah. Dibawah ini mdeet menghitung unit cost per siswa.

Unit *cost* (biaya satuan) =

Rumus itu menjelaskan berapa biaya operasional total yang dibutuhkan dalam keberlangsungan PBM dan berapa jumlah murid yang terdaftar disekolah tersebut, maka dari itu bisa dipahami berapa biaya satuan per siswa yang diperlukan pada keberlangsungan PBM sehingga dapat relevan terhadap keperluan belajar murid.[[87]](#footnote-87)

**Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan**

Akunting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh Henke O. Emerson, (1991:3) *“Accounting is the language used to describe the result of economic activities”.* Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan konversi (perubahan) sumberdaya yang ada menjadi barang dan jasa yang bisa dipakai. OIeh karena itu, akunting berkaitan dengan mengukur dan menyingkap hasil dari kegiatan konversi sumber daya tadi. Teknik manajemen yang digunakan adalah. MBO. (Management by Objective). Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan finansial (keuangan) di dalam organisasi laba dan nirlaba.

Fungsi akuntansi yaitu menyampaikan suatu informasi kuantitatif yang bisa dipakai oleh petinggi entitas ekonomi ataupun orang lain guna pengambilan keputusan. Sebagai akuntan dituntut untuk mempunyai ilmu dan wawasan baik tentang berbagai aturan, prinsip pada perumusan info akuntansi sehingga penyampaian informasi secara benar. Selain itu, akuntan dituntut mengembangkan sistem yang memastikan setiap kegiatan ekonomi tercatat dengan rapih, mencukupi dan sesuai.

Pemerintah pusat melalui kementerian negara/lembaga dalam menganggaran pendidikan dengan mengalokasikan pengeluaran pada anggaran. Anggaran pendidikan melaui daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan dalam rangka penerapan otonomi daerah. Berdasarkan PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota pendidikan merupakan salah satu urusan wajib daerah.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performancenya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakanpelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.[[88]](#footnote-88)

Pertanggungjawaban keuangan pendidikan merupakan sistem yang berhubungan dengan mempertanggungjawabkan pemasukan, penyimpanan, dan pengeluaran kepada pihak yang memiliki kewenangan atasnya. Pertanggungjawaban itu dituangkan dalam format laporan harian, bulanan, triwulan dan tahunan kepada (1) Pimpinnan Dinas Pendidikan kota/kabupaten; (2) Kepala Badan Keuangan Daerah; dan (3) pihak pemberi dana dalam hal ini Kemendikbud provinsi sebagaimana dengan kegiatan yang mendapat persetujuan serta diterima anggarannya. Format pertanggungjawaban itu disebut dengan UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) disampaikan tiap bulannya kepada pemerintah tersebut oleh orang/pihak yang ditentukan sebagaimana format dan waktu.

Kepala sekolah harus melaporkan aspek pembiayaan terlebih pada pendapatan dan pembelanjaan dana sekolah. Melakukan evaluasi yang dilaksanakan tiap semester atau triwulan. biaya yang dimanfaatkan akan dilakukan pertanggung jawaban terhadap sumber perolehan biaya tersebut. Jikalau biaya itu didapat dari orangtua/wali murid maka mempertanggungjawabkannya juga kepada orangtua/wali murid tersebut oleh kepala sekolah. Seperti itu juga jika perolehan biaya tersebut dari pemerintah maka mempertanggungjawabkannya juga kepada pemerintah.[[89]](#footnote-89)

Aspek akuntasi ini merupakan yang sangat penting, dalam penelitian ini akan ditelaah akuntasi keuangan dengan indikator sebagai berikut:

1. Neraca, laporan sumber dan pemanfaatan dana

Neraca merupakan laporan letak keuangan lembaga pada waktu tertentu yang menerangkan jumlah aktiva, utang, dan modal lembaga tersebut. Pelaporan sumber dan pemanfaatan dana merupakan laporan tentang dari mana lembaga memperoleh biaya guna mendanai program-program dan kenapa biaya itu dimanfaatkan pada kurun waktu tertentu.

1. Analisis neraca

Pada dasarnya penilaian terhadap pembaca adalah membandingkan laporan raja beberapa periode minimal 2 periode. Untuk menilai neraca perusahaan, kita mengenal beberapa analisis yang masing-masing punya kegunaannya sendiri. Supaya terdapat keseragaman dalam cara analisis neraca untuk semua cabang maka analisis yang digunakan adalah: Analisis horizontal, Analisis vertikal, Analisis per pos neraca.

1. Analisis rugi laba

Cara melaksanakan analisis rugi-laba adalah sama dengan analisis neraca yaitu menggunakan analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis unsur laba-rugi.

1. Analisis sumber dan penggunaan dana

Analisis sumber dan pemanfaatan dana ditujukan untuk mengerti bagaimana, dari mana, untuk apa lembaga memperoleh dana yang akan dimanfaatkan pada kurun waktu tertentu. Analisis sumber dan penggunaan dana tersebut begitu esensial sebab dengan hal ini lembaga bisa mendapati: 1) Kebijakan pengeluaran yang diputuskan lembaga pada waktu bersangkutan; 2) Perubahan posisi fast aktiva dan perubahan posisi utang serta modal pada neraca yang menggambarkan pertambahan atau pengurangan modal kerja.

1. Analisis rasio

Analisis rasio adalah analisis tentang relasi antara pos satu atau grup rekening lain pada pelaporan keuangan costumer. Tujuan analisis rasio adalah analisis penunjang pada analisis keuangan nasabah dan merupakan salah satu basis untuk menetapkan keputusan.

1. Proyeksi laba

Proyeksi laba adalah rencana atau target keuntungan suatu lembaga dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan pengertian tersebut maka proyeksi laba terdiri dari tiga kelompok yaitu: Pendapatan, biaya dan laba

1. Analisis *Cash Generation*

Analisis cash generation ini dibutuhkan untuk akuntan dalam menanggapi berbagai pertanyaan fundamental tentang kondisi keuangan dari lembaga tertentu pada waktu mendatang, yaitu: 1) Apakah upaya yang bersangkutan wajar biaya, 2) Bagaimana potensi lembaga untuk menggantikan fixed asset, 3) seberapa besar potensi lembaga mengatasi debt service, 4) sebeerapa besar lembaga membayar dividen, 5) Bagaimana pengembangan yang dilaksanakan dihubungkan terhadap potensi cash generation.

1. Proyeksi kas

Cash flow adalah deskripsi atas semua rencana pendapat dan pembelanjaan uang kas lembaga tertentu pada beberapa waktu. Cash flow begitu berarti bagi kegiatan analisis ataupun pengontrolan pembiayaan. Asas-asas dalam perumusan cash flowa adalah dipahami lebih dulu apakah disusun secara tunai ataukah cash basis. [[90]](#footnote-90) cash basis adalah pemasukan diakui ketika uang tunai diterima bukan pada saat penjualan dilakukan, biaya-biaya diakui pada saat bank tunai dikeluarkan bukan pada saat biaya timbul.

1. **Penilaian (*Auditing*) Anggaran Pendidikan**

Ide dasar terkait pengawasan anggaran memiliki maksud untuk membandingkan, mengukur, menilai pendistribusian biaya serta tingkat pemanfaatannya. Pengawasan adalah term yang cukup dikenal.

Pengawasan yaitu satu dari sekian peran manajemen. Peran itu wajib dilaksanakan di tiap lembaga. Ketidaksanggupan atau kekurangan dalam menjalankan peran tersebut begitu berpengaruh pada pencapaian target lembaga.

Adapun ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan pengawasan dapat diterjemahkan dari QS. Al Infithaar ayat 10-12 sebagai berikut:

وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ ١٠ كِرَامٗا كَٰتِبِينَ ١١ يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ ١٢

Artinya*: “10. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), 11. yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), 12. mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [[91]](#footnote-91)*

Selain ayat diatas juga terdapat ayat lain yang berhubungan dengan pengawasan yaitu QS. Al Shaff ayat 2 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ٢

Artinya*: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan.” [[92]](#footnote-92)*

Dan dalam QS. At-Tahrim ayat 6

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” [[93]](#footnote-93)*

Selain ketiga ayat di atas juga terdapat ayat lain yang berhubungan dengan pengawasan yaitu QS. Al-Nisa’: 58 sebagai berikut:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [[94]](#footnote-94)*

Berdasarkan empat ayat di atas, mengingat kita bahwa apa yang kita kerjakan sesungguhnya dalam pengawasan para malaikat yang melihat apa yang dikerjakan kita. Dan Allah akan mencatat setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, karena Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah SWT. melarang kita berdusta, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Serta kita diwajibkan melaksanakan perintah Allah.

Proses pengawasan pembiayaan disebut dengan term auditing yaitu program yang berkaitan dengan aktivitas mempertanggung jawabkan pemasukan, pengeluaran dan penyimpanan, atau penyerahan dana yang dilaksanakan Bendahara kepada setiap pihak yang memiliki kewenangan.:

1. **Definisi Pengawasan**

Pengawasan merupakan proses memantau berbagai program. Dengan tujuan untuk menetapkan tujuan yang dapat diwujudkansecara nyata dan memperbaiki semua penyimpangan yang ada. Maka dari itu, pengawasan dalam konteks pendidikan adalam kegiatan memantau berbagai program lembagasehingga dapat diketahui progeam tersebut telah dijalankan oleh lembaga pendidikan.[[95]](#footnote-95)

1. **Pentingnya Pengawasan**

Setidaknya terdapat tiga aspek yang mengakibatkan pengawasan itu penting untuk dilaksanakan pada lembaga.

1. *Akuntability;* (akuntabilitas) agar semua tenaga atau karyawan pada sebuah lembaga mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, mereka perlu mengetahui secara pasti apa tugas dan tanggung jawabnya, bagaimana performa mereka akan diukur, dan standar keberhasilan performa yang digunakan sebagai kriteria didalam pengukurannya.
2. *Rapidity of change;* (perubahan dengan cepat) setiap lembaga merupakan institusi sosial yang tidak bisa terlepas dari lingkungannya, agar perubahan-perubahan lingkungan bisa dipantau dan menyesuaikan taktik dan strategi terhadap perubahan perubahan itu bisa dilakukan perlu adanya sistem pengawasan
3. *Complexity today’s organization;* (kompleksitas organisasi saat ini) setiap lembaga yang besar dan maju mempunyai program yang bermacam-macam untuk mencapai tujuan yang juga besar dan kompleks.
4. **Prinsip-Prinsip Pengawasan**

Pengawasan pada hakikatnya dijalankan guna memonitor, memberi arah, dan membimbing kinerja, tidak dianggap sebagai aktifitas yang menyeramkan. Karenanya, perlu melaksanakan pengawasan dengan cara terbaik. Terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar yaitu prinsip:

1. manajerial
2. organisasi
3. transparan dan objektif
4. perbaikan dan pencegahan
5. keefisienan dan fleksibilitas.[[96]](#footnote-96)

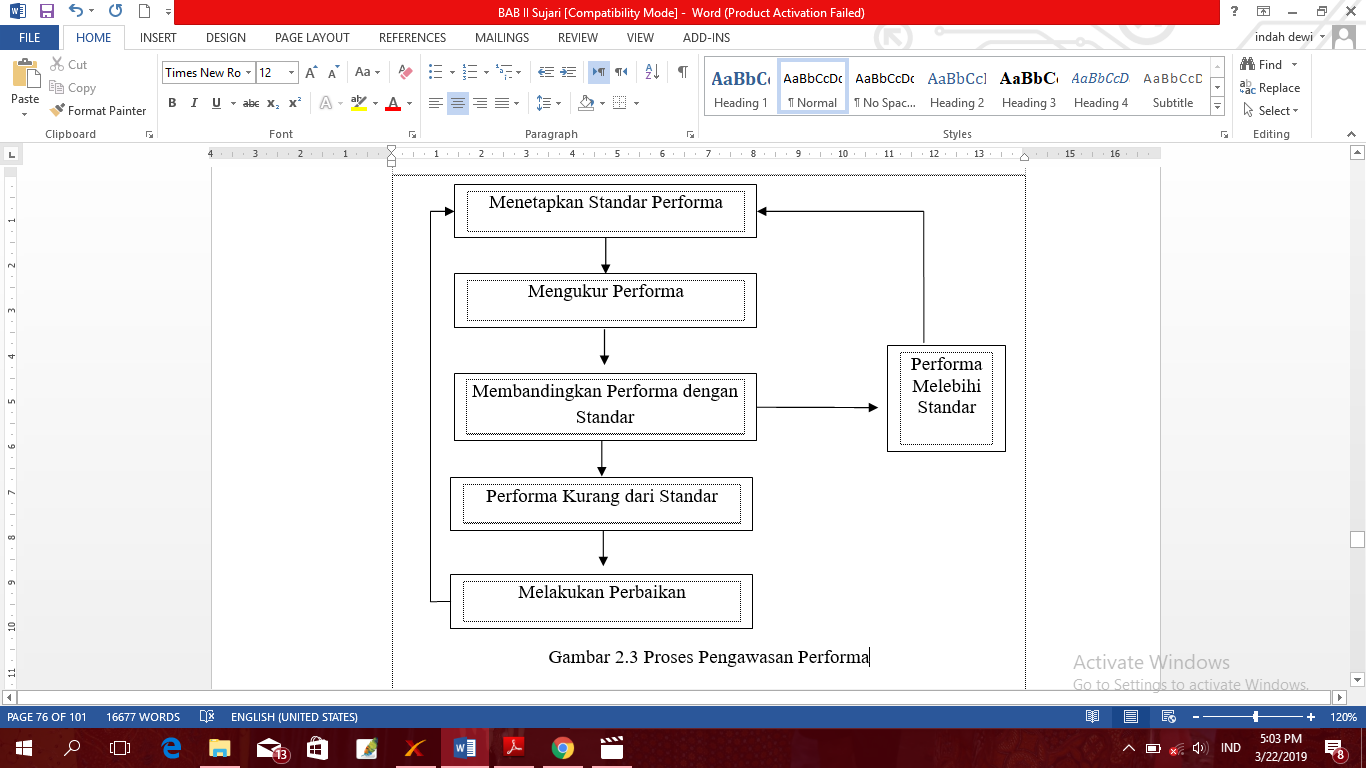
Dalam kebijakan umum pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rakernas dalam Nanang Fattah mengemukakan bahwa sistem pengawasan seyogyanya berdasarkan pada:

1. Sistem pengawasan fungsional yang dilaksanakan semenjak dimulainya perencanaan yang berkaitan dengan segi penilaian keekonomisan, keefektifan, keefisienan, yang meliputi semua kegiatan pada tiap sektor organisasi.
2. Temuan yang didapat dari pengawasan harus ditindaklanjuti dengan sinkronisasi antara petugas yang mengawasi dan petugas penegak hukum serta lembaga tertentu yang ikut serta menyamakan pemahaman, mencari solusi untuk permasalahan yang ada.
3. Pengawasan harus lebih mengarah kepada berbagai bidang strategis dan mengindahkan aspek dalam manajemen.
4. Pengawasan seyogyanya berdampak pada pemilihan masalah secara komprehensif dan konseptual.
5. Pengawasan dilaksanakan oleh setiap orang yang mempunyai kemampuan teknis, kepribadian, kesetiaan, dan kejujuran.
6. Akurat, adanya informasi data yang tepat.
7. Tepat waktu.
8. Komprehensif dan objektif.
9. Tidak menimbulkan pemborosan.
10. Gerakan dan program pengawasan memiliki tujuan menyelaraskan rancangan yang telah ditetapkan.
11. Pengawasan harus bisa meluruskan dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana perencanaannya.
12. **Prosedur Pengawasan**

Terdapat berbagai macam pendapat ahli mengenai prosedur pengawasan, yang pada intinya langkah-langkah yang diterapkan dalam pengawasan yaitu:

1. Menentukan standar performa,
2. Melakukan pengukuran performa nyata,
3. Mengecek keseuaian performa nyata terhadap standar performa yang sudah tentukan,
4. Memperbaiki performa jika terdapat performa nyata tidak selaras terhadap standarnya.

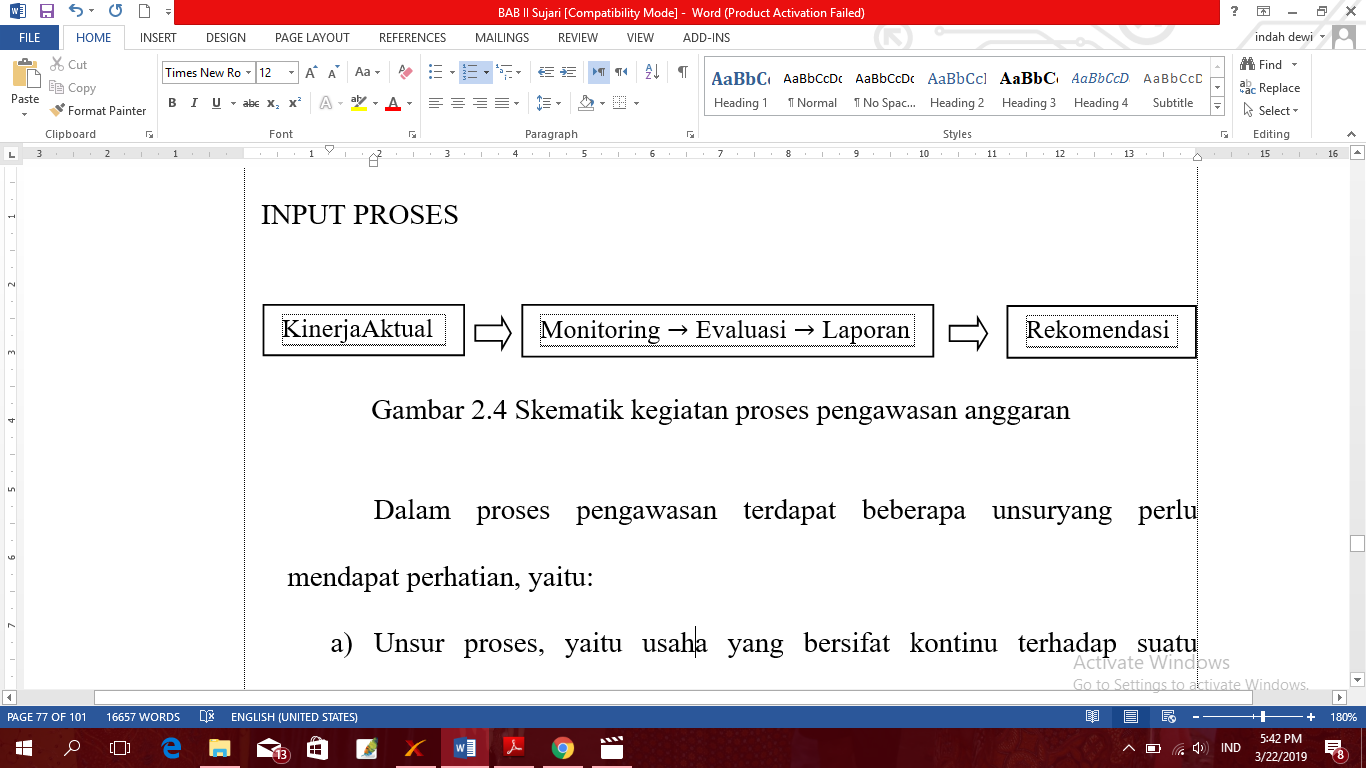
Proses pengawasan yang terdiri dari empat hal tersebut sesuai dengan model Steers dan kawan-kawannya, yang dialihbahasakan oleh Ibrahim Bafadal[[97]](#footnote-97), sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Proses pengawasan secara sederhana meliputi tiga pokok aktifitas:

1. Melakukan peengamatan (*monitoring*),
2. Melakukan penilian,
3. Membuat laporan hasil yang ditemukan, aktifitas atau monitoring dilaksanakan terhadap kinerja nyata (*actualperformance*), baik itu pada pelaksanaan ataupun hasilnya. Aktivitas yang sedang dan telah dilakukan terhadap kinerja aktual (aktual performance) dalam proses maupun hasilnya.[[98]](#footnote-98)

Gambaran skematik kegiatan berlangsungnya pengawasan anggaran bisa dilukiskan sebagaimana dibawah ini:



Ada unsur-unsur yang harus lebih diperhatikan pada proses pengawasan diantaranya:

1. Unsur proses, merupakan upaya berkesinambungan terhadap tindakan dari pelaksanaan rencanaan hingga dengan hasil akhir yang diinginkan;
2. Unsur obyek pengawasan, adalah perihal yang menjadi target pengawasan, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran;
3. Ukuran atau standardisasi pengawasan;
4. Teknik-teknik mengawasi.

Dan tahapan lain yang harus dilaksanakan pada pengawasan adalah:

1. Menentukan standar ukuran yang digunakan meliputi jumlah, mutu, waktu dan biaya;
2. membandingkan pelaksanaan yang sebenarnya dengan standarnya;
3. mencari adanya penyimpangan;
4. koreksi dan menetapkan upaya perbaikan atau rekomendasi.[[99]](#footnote-99)
5. **Model Analisis Biaya Manfaat Pendidikan**

Model merupakan representasi, rencana, atau gambaran yang menerangkan konsep, sistem, atau obyek tertentu, yang kerapkali berbentuk idealisasi atau simplifikasi. Motifnya berbentuk model fisik seperti prototype, maket. Model citra seperti citra computer, gambar rancangan, ataupun rumusan matematis. Dalam hal ini model analisis biaya manfaat pendidikan berkaitan dengan konsepsi biaya pendidikan yang bersifat kompleks dari manfaat sebab komponen biaya meliputi bermacam-macam sifat dan segi. Biaya pendidikan itu tidak hanya berupa uang namun juga berupa biaya kesempatan (*opportunity cost*).[[100]](#footnote-100)

Biaya langsung pendidikan di S1 disebut Cd (S1) dan biaya kesempatan yang hilang sebab meneruskan pendidikan S1 disebut Y (SMU), maka total biaya pendidikan S1 adalah gabungan antara seluruh biaya yang langsung dibayarkan untuk bersekolah S1 ditambah dengan jumlah rata-rata penghasilan tamatan SMU selama bersekolah S1 (*earningForgone*) dan diformulasikan:

C (S1) = Cd (S1) + Y (SMU)

Keterangan:

C (S1) : Biaya total pendidikan S1

Cd (S1) : Biaya langsung pendidikan S1

Y (SMU) : Jumlah rata-rata penghasilan tamatan SMU selama bersekolah S1 (*earningForgone*).[[101]](#footnote-101)

Berikut ini adalah beberapa model yang bisa dipergunakan dalam menganalisis biaya dihubungkan dengan manfaat (*benefit*) pendidikan:

* 1. Model Rate of Return

Nilai ini merupakan nilai diskonto guna bermanfaat di masa depan serta nilai tambah bagi biaya yang telah digunakan pada waktu lalu. Nilai r pertama dipakai untuk menghitung nilai sekarang dari biaya C (0). kemudian nilai r ini disimulasikan kepada rumus nilai sekarang manfaat pendidikan B (0) hingga mencapai nilai (r) tertentu yang bisa menyamakan B (0) dengan C (0).[[102]](#footnote-102)

* 1. Model Analisis Biaya dan Manfaat Investasi Pendidikan

Analisis Biaya-Manfaat Investasi pendidikan adalah metodologi yang akan digunakan untuk mengukur apakah pendidikan merupakan investasi yang menguntungkan atau tidak. Caranya yaitu dengan membandingkan seberapa besar manfaat pendidikan (pada suatu jenjang pendidikan) relatif terhadap biaya yang dikeluarkan.

* 1. Model Konvensional

Model ini didasari oleh pengembangan Teori Human Capital. Asumsi model ini adalah bahwa pendapatan yang diobservasi berbeda pada setiap pekerja menurut umur, tingkat pendidikan/lamanya tahun dalam pendidikan. Analisis biaya dan manfaat pendidikan berdasarkan modal konvensional dirumuskan:

∑ = ∑

I=t I=T

Cd = biaya pendidikan langsung

yf = earning forgone

Ya = penghasilan/gaji pekerja dengan tingkat pendidikan yang diamati

Yb = penghasilan gaji pekerja dengan tingkat pendidikan pembanding

I = umur lama pendidikan usia produksi pekerja of return to education

T = lama pendidikan

M = usia produksi pekerja

r = Rate of return to education

Kelemahan dari model konvensional adalah sebagai berikut:

* 1. Pendapatan/gaji dipengaruhi pendidikan dan umur, pendahal pendapatan/gaji banyak dipengaruhi faktor lainnya seperti jenis kelamin, status perkawinan, jumlah jam kerja, daerah tempat tinggal, latihan kerja, keahlian, dan semisalnya.
  2. Hasil dari estimasi rate of return cenderung biasa keatas karena tidak memperhitungkan faktor-faktor lainnya.[[103]](#footnote-103)
  3. Model Koreksi Konvensional

Model koreksi konvensional berasumsi bahwa pendapatan yang diobservasi berbeda pada setiap pekerja menurut umur, tingkat pendidikan/tahun dalam pendidikan, dn faktor lainnya (seperti jumlah jam kerja, status perkawinan, daerah tempat tinggal, jenis kelamin). Model koreksi konvensional adalah model konvensional yang telah dikoreksi dengan memasukan alpha (α) koefisien sebagai proporsi pengaruh pendidikan terhadap pendapatan/gaji. Adapun rumusannya sebagai berikut:

∑ = α ∑

i=t i=T

Keterangan

Cd = biaya pendidikan langsung

Yf = earning forgone

Ya = penghasilan/gaji pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang diamati

Yb = penghasilan gaji pekerja dengan tingkat pendidikan pembanding

I = umur

T = lama pendidikan

r = rate of return to education

α1 = proporsi pengaruh pendidikan dari model pendapatan Y = f (umur, pendidikan, faktor lainnya) terhadap pengaruh pendidikan dari model pendapatan Y = f (umur, pendidikan).[[104]](#footnote-104)

Kelebihan dari model koreksi konvensional adalah sebagai berikut:

1. Lebih baik dari persamaan model konvensional karena sudah ada koreksi dari alpha koefisien
2. Hasil estimasi rate of return to education menjadi tidak biasa karena telah memasukkan pengaruh dari faktor-faktor lainnya terhadap pendapatan/gaji.

Kelemahan dari model koreksi konvensional adalah sebagai berikut:

Pendapatan/gaji merupakan fungsi dari umur, pendidikan dan faktor lainnya (jumlah jam kerja, jenis kelamin, tempat tinggal, jenis pendidikan, umur/kejuruaan) tetapi tidak lihat klasifikasi jabatan seorang (manajer, profesional, ahli dan pekerja kasar), pada keahlian/skill berdasarkan jabatan pekerja sangat mempengaruhi pendapatan/gaji.[[105]](#footnote-105)

1. Model Dinamik

Berbeda dengan human capital theory, maka job competition theory memandang bahwa produktivitas seseorang juga merupakan manifestasi dari jabatan atau pekerjaannya, bukan semata-mata karena unsur-unsur yang melekat pada individu yang bersangkutan. Jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian lebih tinggi secara umum akan cenderung produktif dibandingkan jabatan atau pekerjaan yang tidak terlalu menuntut keahlian. Berdasarkan job competition theory ini selanjutnya dikembangkan model dinamik di di mana pendapatan/gaji diformulasikan sebagai:

Ln Y= a2+b2+c2 pendidikan +∑di jabatan + ∑ ei faktor lainnya + error

Model dinamik berfungsi bahwa pendapatan yang diobservasi berbeda pada setiap pekerja menurut umur, tingkat pendidikan/lamanya pendidikan, klasifikasi jabatan, (tenaga kasar, tenaga profesional dan manajer) dan faktor lainnya. Jumlah jamkerja, jenis kelamin, tempat tinggal, status perkawinan, latar belakang ekonomi, keluarga). Adapun rumus model ini adalah sebagai berikut:

∑ = αi ∑

i=t i=T

Keterangan

Cd = biaya pendidikan langsung

Yf = earning forgone

Ya = penghasilan/gaji pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang diamati

Yb = penghasilan gaji pekerja dengan tingkat pendidikan pembanding

I = umur

T = lama pendidikan

r = rate of return to education

α1 = proporsi pengaruh pendidikan dari model pendapatan Y = f (umur, pendidikan, faktor lainnya) terhadap pengaruh pendidikan dari model pendapatan Y = f (umur, pendidikan).

Kelebihan dari persamaan model ini adalah sebagai berikut:

1. Lebih baik dari model-model sebelumnya karena selain sudah ada koreksi dari alpha koefisien, model dinamik ini juga menggunakan accupation dummy variable kedalam fungsi jabatan.
2. Model ini dalam mengestimasi rate of return to education lebih dinamis sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja.[[106]](#footnote-106)
3. **Hambatan dan Pendukung dalam Pembiayaan Pendidikan**

Kondisi pendidikan Indonesia masih memprihatinkan. Bermacam kebijakan terlihat masih juga belum bisa mendeskripsikan tali permasalahan pendidikan negeri. Terutama, kurang aplikatifmya model kebijakan pendidikan yang ditetapkan. Dampaknya adalah masalah terbut mempersulit masyarakat untuk dapat secara aktif berbartisipasi dan berperan penting guna mengembangkan sistem pendidikan nasional yang lebih komperehensif. Contohnya adalah adanya kebijakan pemerintahan pada aspek pengembangan kurikulum. Di tiap periode gantinya pemerintahan, tetap saja muncul pengembangan bahkan perubahan kurikulum pendidikan. Model kebijakan seperti ini secara tak langsung cenderung menguras waktu. Disamping itu, pusat konsentrasi kebijakan hanya berkisar pada proses pengenalan kebijakan atau sosialisasi, akibatnya proses pelaksanaan kurikulum yang merupakan inti dari kebijakan itu justru terlalaikan dan tidak berlangsung dengan optimal.[[107]](#footnote-107)

Dalam konteks kebijakan desentralisasi, setiap manajer lembaga pendidikan Islam diharuskan untuk bisa berinisiatif dalam rangka menanggapi berbagai kecenderungan dinamisnya perkembangan jaman. Maka dari itu, seluruh pelaku pendidikan Islam perlu menyadarinya, baik itu tingkat birokrasi penentu kebijakan (*decision maker*) maupun pelaksana lokasi pendidikan, sesungguhnya usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah proses yang menyatu dengan proses peningkatan SDM.[[108]](#footnote-108)

1. **Indikator Mutu Pendidikan**

Kualitas pendidikan kerapkali disimbolkan dengan keadaan yang baik, mencukupi syarat, dan semua komponen yang wajib ada pada pendidikan, komponen itu meliputi masukan, proses, keluaran, sarana-prasarana, tenaga, dan biaya kependidikan. Kualitas pendidikan terbut adalah satu dari unsur yang menentukan daya saing bangsa, sehingga agar bisa bertahan pada dinamika globalisasi, mutlak membutuhkan pendidikan yang berkualitas.[[109]](#footnote-109)

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional, dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia (menyeluruh). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:“Bahwa pendidikan nassionalberfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Kualitas pendidikan wajib diusahakan agar dapat memajukan dengan berlandas pada perubahan tertentu yang terencana. Peningkatan kualitas pendidikan didapatkan dengan dua prosedur: (1) orientasi akademis pada upaya meningkatkan mutu pendidikan, untuk memberi fondasi minimal pada upaya yang dijalankan untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang menjadi syarat oleh perkembangan tuntutan zaman, (2) orientasi keterampilan hidup esensial pada upaya meningkatkan mutu pendidikan, yang lingkupi oleh pendidikan berasas nyata, bermakna, dan luas.[[110]](#footnote-110)

Pendidikan bermutu dapat diketahui dari sisi proses serta produk yang dihasilkan. *Pertama,* pendidikan dapat dikatakan berkualitas diketahui dari sisi proses, begitu juga *input* atau masukan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. PBM bisa disebut efektif, jika sepanjang PBM berlangsung, murid merasakan proses pembelajaran yang berarti. Disini pelaksanaan pendidikan bukan hanya berlangsung mulus dan apik, namun juga proses pendidikan, pembelajaran khususnya bisa menempatkan peserta menjadi subyek yang memperoleh perlakuan secara *humanistik,* karenanya murid akan merasa mempunyai cukup kebebasan untuk menginterpretasikan setiap potensi yang dimilikinya. Kedua, pendidikan dapat dikatakan berkualitas dari sisi produk, bila murid memperlihatkan tanda-tanda seperti penguasaan tugas pembelajaran yang tinggi, hasil pendidikan relevan terhadap keperluan hidup serta tuntutan lingkungan murid tersebut, terutama lingkungan kerja. Selain itu, kemampuan dan keterampilan kerja adalah faktor yang juga sangat penting, yang relevas dengan tuntutan hidup pada masyarakat, maka dari itu adanya lulusan pendidikan pada jenjang apapun bisa memperlihatkan personalitas yang tangguh.[[111]](#footnote-111)

Terdapat 13 karakteristik dalam mutu yaitu:

1. Berkenaan dengan bidang fungsionalisasi sekolah
2. Waktu ajar *(time liness)*: tuntas dalam waktu yang lazim.
3. Keandalan *(reliabilyty)*: usia pelayanan prima bertahan lama
4. Daya tahan *(durability)*; kuat dan ulet
5. Keindahan  *(asetetics)*
6. Interaksi manusiawi *(personal interface);* berpegang pada profesionalisme dan nilai-nilai moral.
7. Penggunaannya mudah *(easy of use)* sarpras yang digunakan.
8. Pola khusus *(featur)* suatukeunggulan.
9. Kesesuaian standart *(conformance to specification)* relevansi pada standar tertentu.
10. Konsistensi *(consistency)*, stabil, konstan, atau ajeg.
11. Keseragaman *(uniformity)*; tanpa tercampur, tidak divariasi.
12. Dapat melayani *(serviceability):* bisa memberikan pelayanan terbaik.
13. Ktepatan *(acruracy)* pelayanan yang tepat.[[112]](#footnote-112)
14. **Hasil Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian yang telah mendahului terkait manajemen pembiayaan secara umum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan disertasi ini antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian Nanang Fattah(1999) disertasi yang berjudul “Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Analisis Hubungan Pembiayaan Pendidikan Dengan Mutu Proses Dan Hasil Belajar Siswa SDN Kabupaten Bandung” diperoleh keadaan dan variasi jumlah penerimaan anggaran biaya pendidikan SDN menunjukkan bahwa sumber dana terbesar yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan SDN adalah berasal dari pemerintah pusat yaitu 90,73% orang tua murid (BP3) 36,88%, Pemerintah Daerah 2,17% dan masyarakat 0,40% Komponen biaya gaji atau kesejahteraan pegawai baik di wilayah perkotaan, kecamatan, maupun pedesaan merupakan komponen biaya yang paling besar sementara itu komponen biaya yang mendapatkan alokasi paling kecil adalah biaya yang kegiatan pembinaan siswa dan pengelolaan pendidikan lokasi untuk kedua komponen tersebut relatif tidak berbeda jauh baik di tingkat wilayah Kota Kecamatan Desa maupun tingkat sekolah.Berdasarkan hasil penelitian Fattah komponen-komponen biaya yang cenderung memberikan kontribusi secara signifikan terhadap mutu dan proses hasil belajar siswa di wilayah perkotaan tingkat kecamatan wilayah pedesaan dan tingkat sekolah yaitu 1) gaji/kesejahteraan pegawai, 2) biaya pembinaan profesional guru, 3) pengadaan bahan pelajaran, 4) Pembinaan kesiswaan, dan 5) biaya pengelolaan sekolah. Sementara komponen-komponen yang cenderung tidak memberikan kontribusi secara signifikan terhadap mutu pendidikan yaitu 1) pengelolaan alat-alat pelajaran, 2) pengadaan sarana kelas, 3) biaya perawatan ruang kelas, dan 4) biaya pengadaan sarana sekolah.[[113]](#footnote-113)
2. Berdasarkan hasil penelitian Mintarsih yang berjudul “Manajemen Keuangan Sekolah Studi Manajemen Keuangan Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dalam Implementasi Otonomi Daerah di Kota Cirebon”. Diperoleh bahwa pembiayaan pendidikan dan manajemen keuangan sekolah dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Kepala sekolah belum memiliki ruang yang cukup untuk memberdayakan kewenangan dan kekuasaanya yang berhubungan dengan komponen-komponen yang terkait dengan manajemen keuangan sekolah seperti pada pembuatan RAPBS, kepala sekolah masih terikat oleh juklak dan juknis yang diturunkan oleh Dinas. Belum ada kepala sekolah yang menggunakan strategi dalam menyusun RAPBS yang dapat meningkatkan penggalian dana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekolah. Selain itu SLIP swasta tidak terlalu sulit dalam menyusun anggaran sebab segala sesuatunya diatur oleh Yayasan. Kepala Sekolah Negeri juga belum menyertakan semua personel (guru) dalam menyusun anggaran. Pihak yang terkait langsung dalam penyusunan anggaran hanya wakil-wakil kepala sekolah, bendahara dan kepala tata usaha. 2) belum ada pola standar mekanisme untuk merealisasikan anggaran, realisasi anggaran yang ada pada sekolah masih cenderung terjadi pemindahan mata anggaran. 3) realisasi anggaran pada SLTP swasta hampir semua ditanggung oleh orang tua siswa. Walaupun ada bantuan dari pemerintah misalnya ada sekolah yang mendapat bantuan guru PNS ada yang mendapat *dropping* DPO dan *dropping* DBO atau *dropping* OPF yaitu anggaran pendidikan rutin sebagian besar dipergunakan untuk gaji dan kesejahteraan guru, mekanisme dalam realisasi anggaran masih belum konsisten, pertanggungjawaban realisasi anggaran harus dibuat setiap bulan. 4) dana pendidikan yang cukup cenderung memberikan layanan yang lebih baik yang berdampak pada mutu lulusan sementara mutu lulusan masih dikaitkan dengan NEM rata-rata yang cukup tinggi. Pada sekolah yang didukung oleh dia yang cukup dapat menghasilkan *output* berkualitas. 5) di SLTP Negeri belum terlihat sistem pengawasan yang jelas walaupun dikatakan ada pengawasan internal dan eksternal pengawasan itu tidak dilakukan secara rutin.[[114]](#footnote-114)
3. Berdasarkan hasil penelitian Rusmana (2005) tentang Sistem Pembiayaan Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten dengan mengambil Studi di Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, secara umum dapat dideskripsikan bahwa belum ada strategi yang jelas dalam menyusun mekanisme pembiayaan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di tingkat pengambil kebijakan pada pemerintah Kabupaten Garut yang bersumber dari APBD Kabupaten, pemerintah provinsi bersumber dari APBD provinsi, dan Depdiknas yang bersumber dari APBN dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) belum ada perhitungan alokasi anggaran yang mengacu pada pencapaian tujuan sebagai bagian dari pencapaian visi dan misi Pendidikan Kabupaten Garut. Anggaran pembiayaan pendidikan yang fluktuatif, sehingga pengusulan anggaran cenderung bersifat spekulatif tidak mendapat kepastian besaran anggaran; 2) di tingkat sekolah terjadi duplikasi anggaran yang bersumber dari pemerintah dan yang bersumber dari masyarakat jumlah perolehan dana dari BP3 bisa lebih besar dibandingkan perolehan resmi dari pemerintah. Jika anggaran dari BP3 tidak diperoleh dari masyarakat setempat oleh sekolah maka sekolah tersebut akan menyelenggarakan programnya hanya mengandalkan dana yang diperoleh dari pemerintah. Dilihat dari proses perencanaan, sasaran anggaran, kebutuhan satuan pendidikan, dan penggunaan anggaran oleh suatu pendidikan, sistem dan aturan pendistribusian anggaran yang dilakukan Dinas Pendidikan atas nama pemerintah daerah termasuk kategori kurang efektif dan tidak efisien; 3) dilihat dari model dan mekanisme pembiayaan pendidikan, pada pemerintah Kabupaten Garut menunjukkan bahwa model pengalokasian dan pendistribusian dana pendidikan yang diterima oleh satuan pendidikan (sekolah) yang sama dengan sebelum Kebijakan otonomi daerah yaitu belum ada strategi yang jelas sebagai acuan teoritis dan konvensional untuk menyusun mekanisme alokasi dan pendistribusian Anggara di tingkat pengambil kebijakan untuk sampai ke satuan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan dan target yang konsisten dengan visi dan misi pendidikan pada pemerintah Kabupaten.[[115]](#footnote-115)
4. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Munir tahun 2012 dengan tema” Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam” , Adapun kesimpulan jurnal tersebut : Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitik beratkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah.Berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu biaya pendidikan yang dikeluarkan masyarakat, biaya pendidikan yang dikeluarkan pemerintah, biaya pendidikan yang dikeluarkan perusahaan dan biaya pendidikan yang dikeluarkan lembaga pendidikan. Dalam kajian pembiayaan pendidikan menyebutkan bahwa kesulitan yang sering dihadapi sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan berawal dari persoalan pengalian dana itu sendiri.[[116]](#footnote-116)
5. Jurnal yang ditulis oleh Nur Eka Setiowati tahun 2015 dengan tema” Manajemen pembiayaan pendidikan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Terpadu Nurushiddiq Cirebon’’. Adapun kesimpulan jurnal tersebut: Secara umum manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan terpadu dan pondok pesantren nurushiddiq Cirebon sudah memenuhi standar lembaga pendidikan. Hanya saja karena tidak ada patokan baku yang berlaku secara umum pada lembaga pesantren, standar kecukupan atau ketidakcukupan khusus pesantren tidak dapat diketahui. Apalagi secara riil sistem pendidikan dan siklus kehidupan di pesantren berbeda dengan lembaga formal lainnya. Pihak yang terlibat dalam perencanaan pembiayaan sudah komprehensif oleh semua komponen pesantren, yaitu pemimpin pesantren (kyai), yayasan, dan guru. Kesadaran yang tinggi dari para walisantri tentang pentingnya iuran mereka untuk kelangsung pendidikan menyebabkan mereka tidak mempersoalkan besaran nominal yang harus mereka bayar. Ditambah dimensi religius yang mengedepankan sifat ikhlas, makanya biasanya parawalisantri tidak keberatan.[[117]](#footnote-117)
6. Jurnal yang ditulis oleh Hanafiah tahun 2013 dengan tema” Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan pada MAN 1 Sigli Kabupaten Pidie”. Adapun kesimpulan jurnal tersebut: Pengelolaan pembiayaan pada MAN 1 Sigli Kabupaten Pidie pada dasarnya sudah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada MAN 1 Sigli telah berlangsung dan berjalan yang didasarkan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pembiayaan pendidikan yang berlaku secara intern maupun ekstren. Seluruh biaya pendidikan yang diterima oleh MAN 1 Sigli telah dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan.[[118]](#footnote-118)
7. Jurnal yang ditulis oleh Umi Zulfa tahun 2013 dengan tema “Membangun Madrasah bermutu melalui praktek manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat”. Adapun kesimpulan jurnal tersebut: Membangun madrasah bermutu merupakan tanggungjawab kita sebagai masyarakat Islam. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang relatif lebih banyak memiliki kesempatan untuk menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, maka madrasah justru sebaliknya. Kondisi inilah ayang mestinya melecut madarsah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan pendidiakan yang melimpah dan mencukupi seluruh kebutuhan madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan bermutu kepada peserta didiknya. Kreativitas tersebut diwujudkan dalam praktek manajemen pembiayaan pendidikan berbasis pada potensi umat berupa Ziswa, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntable.[[119]](#footnote-119)
8. Jurnal yang ditulis oleh Susilawaty, Cut Zahri Harun, dan Khairuddintahun 2012 dengan tema “Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan pembiayaan di SD Negeri 4 Banda Aceh disusun berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Rencana pembiayaan di SD Negeri 4 Banda Aceh meliputi penganggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan, dan pengembangan dan impelentasi sistema penilaian. Penyusunan perencanaan pembiayaan tersebut didasarkan atas susunan prioritas yang sangat mendesak dan lebih diutamakan dalam setiap tahun anggarannya. Pelaksanaan atau pemanfaatan anggaran diawali dengan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa dana dibelanjakan sesuai rencana, dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana baik pemerintah kota, provinsi, pusat maupun orang tua/wali dan masyarakat.[[120]](#footnote-120)
9. Berdasarkan hasil penelitian Idhochi Anwar (1990) yang berjudul “Transformasi biaya pendidikan dalam layanan pendidikan pada perguruan tinggi (profil layanan tenaga edukatif dalam proses belajar mengajar studi kasus pada IKIP Bandung, UNPAD, dan ITB) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif data yang diperoleh melalui studi dokumentasi pengamatan dan wawancara dengan objek Kepala Biro administrasi umum dan keuangan IKIP Bandung, UNPAD dan ITB. Temuan dan kesimpulan penelitian ini antara lain respon tenaga edukatif terhadap biaya pendidikan pada tingkat lembaga terdapat 5 macam profit yaitu (1) pola respons tenaga edukatif yang defensif, yaitu tenaga edukatif merasa tidak terikat pada gaji yang diterimanya serta tidak memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara optimal. (3) pola respon yang mekanistik yaitu tenaga edukatif merasa terikat kepada gaji yang diperoleh berdasarkan nilai ekonomisnya. (3) pola response yang ada adaptif yaitu tenaga edukatif menganggap layanan pendidikan yang diberikannya kepada layanan sosial. (4) pola respon yang sinotif yaitu tenaga edukatif memandang layanan pendidikan yang diberikan-nya sebagai ibadah yang didasari keiklasan. (5) pola respon yang profesional yaitu tenaga edukatif tergugah lebih berprestasi jika produktivitasnya dan kreativitasnya dihargai penelitian ini antara lain merekomendasikan bahwa dapat dipertimbangkan pemerataan peluang staf edukatif dalam tambahan pendapatan di lingkungan internal dan eksternal tanpa mengabaikan beban tugas pokok.[[121]](#footnote-121)
10. Berdasarkan hasil penelitian Yahya yang judul “Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan Suatu Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan: Sekolah Dasar di Provinsi Sumatera Barat” dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yahya menarik kesimpulan dari penelitian tersebut: 1) sistem pembiayaan pendidikan yang ada belum memiliki mekanisme yang jelas sebab alokasi dana yang diterima sekolah ada yang di awal, di tengah, atau pada akhir tahun ajaran; 2) sistem manajemen pembiayaan pendidikan sekolah dasar belum mempertimbangkan tingkat kemampuan membayar (*ability to pay*) pada masyarakat, apakah tergolong mampu atau kurang. Subsidi yang diberikan pemerintah dalam bentuk dana rutin (*fixed cost*) berlaku sama berdasarkan sekolah, jumlah kelas, dan jumlah murid di setiap daerah, sehingga pembiayaan pendidikan yang adil (*equity),* kesamaan (*equality),*  kecukupan (*adequacy*) dan layak (*feasible)* belum terpenuhi; 3) budaya masyarakat Minangkabau sebagai suatu potensi yang menganut sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan melalui ibu atau ikatan kedaerahan belum di berdayakan dan di organisasi secara maksimal untuk kepentingan masyarakat Nagari.[[122]](#footnote-122)

Berdasarkan penelitian terdahulu hanya mengkaji mengenai 1) perbedaan mendasar pembiayaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, 2) pola standar mekanisme anggaran pendidikan, 3) strategi pembiayaan, 4) pendistribusian benefit dan beban yang ditanggung oleh masyarakat, 5) standar kecukupan dan ketidakcukupan pendidikan di pesantren., 5) pelaksanaan pengawasan pendidikan disekolah menengah atas, 5) transformasi biaya pendidikan dalam layanan pendidikan pada perguruan tinggi, 6) pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar. Sedangkan dalam penelitian ini kajian manajemen pendidikan menekankan pada manajemen pembiayaan di sekolah Islam terpadu, dengan indikator perencanaan anggaran (*planning*), Sumber Dana, Pelaksanaan Anggaran Pendidikan, Akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan yang belum dilakukan pada penelitian terdahulu.

1. **Kerangka Pikir Penelitian**

Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.  Kerangka pikir juga merupakan tahap-tahap dalam berpikir yang logis dalam membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis, sehingga kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan dan dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.”

Pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang didalamnya akan terdapat keterkaitan setiap komponennya. Pembiayaan pendidikan, merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang ditetapkan. Pembiayaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari: a). anggaran Pemerintah; b. bantuan pemerintah daerah; c). pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; d). bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya; e) bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau f. sumber lain yang sah. manajemen pembiayaan meliputi perencanaan anggaran, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan.

Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Lampung Tengah memiliki perencanaan yang baik dimana Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) telah disusun dan dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Adapun unsur RAPBS yang terbagi dalam (1) Belanja Rutin, yaitu: over head, ekskul, dan insentive; (2) Investasi, yaitu: Bangunan, peralatan, dan kendaraan; dan (3) Pendapatan, yaitu: siswa, pemerintah, swasta, usaha sekolah, dan Yayasan Keluarga Muslim (YKM).

Berdasarkan fenomena dan fakta nyata yang ada di lapangan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba merepresentasikan bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan dan keunikan yang ada di Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Lampung Tengah secara lebih mendalam. Adapun komponen-komponen manajemen pendidikan meliputi: 1) Perencanaan Anggaran (*planning*); 2) Sumber Dana; 3) Pelaksanaan Anggaran Pendidikan; 4) Akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan: 5) Pemeriksaan dan Pengawasan Anggaran Pendidikan. Komponen-komponen tersebut dianalisis dan dikaitkan terhadap mutu pendidikan, dimana indikator mutu pendidikan meliputi:1) Masukan; 2) Proses; 3) Keluaran; 4) Tenaga kependidikan; 5) Sarana-Prasarana dan; 6) Biaya sehingga akan diperoleh temuan Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah islam terpadu. oleh karena itu peneliti terdorong untuk mengkaji manajemen pembiayaan disekolah tersebut, sehingga peneliti mengambil judul penelitian yaitu: “Manajemen Pembiayaan Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Lampung Tengah”.

**Kerangka Pikir Penelitian**

**Permasalalahan**

Bagaimana implementasi manajemen pembiayaan sekolah IT Bustanul Ulum Lamp. Tengah

1. Budgeting
2. Accounting
3. Auditing
4. model

**Tujuan Penelitian**

Menghasilkan Model Pembiayaan Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum

Lampung Tengah

**Konsep Manajemen**

1. Planning
2. Organizing
3. Actualling
4. Controling

**Konsep Manajemen**

1. Peramalan
2. Penetapan Tujuan
3. Perumusan Kebijakan
4. Pemrograman

**Konsep Manajemen Pembiayaan**:

1. Peramalan
2. Penetapan Tujuan
3. Perumusan Kebijakan
4. Pemrograman

Landasan Filosofi

1. Al-Hasyr: 28
2. Al-Kahfi: 46
3. Al-Mujadalah: 10-13
4. Al-Baqarah: 147, 245
5. Al-Nisa’: 58

**RKAS Manajemen Pembiayaan:**

1. Manajemen Sekolah
2. Praktikum Pengajaran
3. Fasilitas Belajar
4. Personel Sekolah
5. Bahan Penunjang Pembelajaran
6. Pemeliharaan dan Perbaikan sarana akademik
7. Penunjang daya dan jasa
8. Ujian-ujian sekolah

Sumber Dana

1. Pemerintah
2. Orang tua
3. Masyarakat
4. Alumni
5. Peserta didik
6. Wirausaha

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH

1. Planning
2. Actualing
3. Auditing

Manajemen Pembiayaan AKADEMIK

1. Praktikum Pengajaran
2. Fasilitas Belajar
3. Bahan Penunjang Pembelajaran
4. Ujian-ujian sekolah

Manajemen Pembiayaan

NON-AKADEMIK

1. Manajemen Sekolah
2. Personal Sekolah
3. Pemeliharan dan Perbaikan sarana akademik
4. Penunjang daya dan jasa

MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAN SEKOLAH ISLAM TERPADU BUSTANUL ULUM LAMPUNG TENGAH

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

1. Mutu capaian
2. Mutu program
3. Mutu keluaran

141

1. Assauri, Sofjan. *Managemen Produksi,*  Edisi   Revisi, (Jakarta: LPFE Universitas Indonesia. 2003) [↑](#footnote-ref-1)
2. Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan,* Surabaya: Haji Mas Agung, 1997, h.78. [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Yacoeb. Konsep Manajemen Dalam Perspektif Al-Qur’an: Suatu Analisis dalam Bidang Administrasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Didaktika* Agustus 2013 VOL. XIV NO. 1, 74-89 (Diakses 06 Januari 2017) [↑](#footnote-ref-3)
4. Harold Koontz and Cyril O’Donnel, *Principle of Management: An Analysis of Managerial Function,* (Tokyo, McGraw-Hill, Kogakusha Ltd, 1972), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 587 [↑](#footnote-ref-5)
6. Nanang Fattah. *Landasan Manajemen Pendidikan.(*Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). h. 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Daryanto dan Muhammad Farid. *Konsep dasar manajemen pendidikan di sekolah*. (Yogyakarta: Gava Media. 2013). h. 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006) h. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid. h. 12 [↑](#footnote-ref-9)
10. Stoner, James AF, R. Edward Freman. Management. Jakarta. Inter Media. 1994 [↑](#footnote-ref-10)
11. Mariono, dkk., Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 1. [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://www.kompasiana.com/har_rangkuti/manajemen-pembiayaanpendidikan_>54f67ce4a33311b07d8b4ddc, diakses 14 Nopember 2018, pukul 09:00 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibrahim Bafadal. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara. 2003 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ririn Tius Eka Margareta.*Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri.* Jurnal Manajemen Pendidikan. Volume: 4, No. 2, Juli-Desember 2017. h. 198 [↑](#footnote-ref-14)
15. Daryanto dan Muhammad Farid. Op cit. h.129 [↑](#footnote-ref-15)
16. Daryanto dan Muhammad Farid. Op cit. h. 130 [↑](#footnote-ref-16)
17. Daryanto dan Muhammad Farid. Op cit. h. 130-131 [↑](#footnote-ref-17)
18. Matin. Op.cit. h. 1 [↑](#footnote-ref-18)
19. Nanang Fattah. Op.cit. h. 23 [↑](#footnote-ref-19)
20. Matin. Op.cit. h.4 [↑](#footnote-ref-20)
21. Daryanto dan Muhammad Farid. Op cit. h. 131-134 [↑](#footnote-ref-21)
22. Nanang Fattah. Op cit. h. 29 [↑](#footnote-ref-22)
23. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 793-794 [↑](#footnote-ref-23)
24. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 113 [↑](#footnote-ref-24)
25. Nanang Fattah. Op.cit. h. 98 [↑](#footnote-ref-25)
26. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 793 [↑](#footnote-ref-26)
27. Susilawaty, Cut Zahri Harun, dan Khairuddin**.** Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh. Jurnal Administrasi Pendidikan. Volume 1, No. 2, November 2012. h. 40 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid. H. 37 [↑](#footnote-ref-28)
29. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 417 [↑](#footnote-ref-29)
30. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 389 [↑](#footnote-ref-30)
31. Nanang Fattah. Op.cit. h.26 [↑](#footnote-ref-31)
32. Susilawaty, Cut Zahri Harun, dan Khairuddin. Op. Cit. h.40 [↑](#footnote-ref-32)
33. Suwarni. Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Dehasen Bengkulu. Jurnal Ekombis Review. H. 84 (diakses tanggal 05 Januari 2017) [↑](#footnote-ref-33)
34. Daryanto dan Muhammad Farid. Op cit. h. 3 [↑](#footnote-ref-34)
35. Akdon. *Op.cit.* h.31 [↑](#footnote-ref-35)
36. Dadang Suhardan. Op.cit. h.25 [↑](#footnote-ref-36)
37. Daryanto dan Muhammad Farid. Op cit. h. 131-134 [↑](#footnote-ref-37)
38. Op. Cit. h. 134 [↑](#footnote-ref-38)
39. Daryanto dan Muhammad Farid. Op cit. h. 131-134 [↑](#footnote-ref-39)
40. ibid. h. 54 [↑](#footnote-ref-40)
41. Dadang Suhardan.. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung, Alfabeta, 2014) h.63 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid. h. 15-17 [↑](#footnote-ref-42)
43. Nanang Fattah. Op.cit. h. 77 [↑](#footnote-ref-43)
44. Hikmat. Op.cit. h. 18 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibid. h. 19 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid. h. 22 [↑](#footnote-ref-46)
47. Daryanto. op. cit. h. 1 [↑](#footnote-ref-47)
48. T. Hani Handoko, Manajamen, Edisi 2, (Yogyakarta, BPFE ,1999),. 9 [↑](#footnote-ref-48)
49. Hikmat. Op.cit. h.24 [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid. h. 24-25 [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid. h. 27 [↑](#footnote-ref-51)
52. Muhaimin. Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah,(Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,2009) hal 2-4 [↑](#footnote-ref-52)
53. Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam,(Erlangga) hal 15-16 [↑](#footnote-ref-53)
54. M. Natsir Ali, Dasar-dasar Ilmu Mendidik, (Jakarta: Mutiara.1997). hal. 42 [↑](#footnote-ref-54)
55. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 277 [↑](#footnote-ref-55)
56. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat 1 dan 2 [↑](#footnote-ref-56)
57. Mujamil Qomar. Manajemen pendidikan islam. (jakarta: Erlangga, 2007) hal. 20 [↑](#footnote-ref-57)
58. Romayulis, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta : kalam Mulia,2008) hal. 274 [↑](#footnote-ref-58)
59. Imam Gunawan, dkk. Manajemen Pendidikan suatu pengantar praktik, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.37 [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid. h.40 [↑](#footnote-ref-60)
61. Nanang Fattah. Op.cit. h.49 [↑](#footnote-ref-61)
62. Udin Syaefudin Sa’ud dan Abin Syamsuddin Makmun. Op. Cit. h. 3-4 [↑](#footnote-ref-62)
63. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 799 [↑](#footnote-ref-63)
64. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 389 [↑](#footnote-ref-64)
65. Ibid., h. 9 [↑](#footnote-ref-65)
66. Ibid., h. 10 [↑](#footnote-ref-66)
67. Ibid., h. 11 [↑](#footnote-ref-67)
68. Ibid., h. 18 [↑](#footnote-ref-68)
69. Dadang Suhardan. dkk. Op.cit. h. 261-264 [↑](#footnote-ref-69)
70. Op cit. Imam Gunawan, dkk. h. 41 [↑](#footnote-ref-70)
71. Op cit. Imam Gunawan, dkk. h. 42 [↑](#footnote-ref-71)
72. Op cit. Imam Gunawan, dkk. h. 44-47 [↑](#footnote-ref-72)
73. Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan, (*PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996) [↑](#footnote-ref-73)
74. Udin Syaefudin Sa’ud dan Abin Syamsuddin Makmun. Op. Cit. h. 43 [↑](#footnote-ref-74)
75. Udin Syaefudin Sa’ud dan Abin Syamsuddin Makmun., op.cit. 24-25 [↑](#footnote-ref-75)
76. Ibid 33 [↑](#footnote-ref-76)
77. Syafarudin. Op. cit. h. 112 [↑](#footnote-ref-77)
78. Dadang Suhardan, dkk. Op. Cit h. 258 [↑](#footnote-ref-78)
79. Ibid. h. 258 [↑](#footnote-ref-79)
80. Mohammad Ali, dkk. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan,* Bandung. Paedagogiana Press. 2007. h. 168 [↑](#footnote-ref-80)
81. Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2003), h.5-6 [↑](#footnote-ref-81)
82. Daryanto dan Muhammad Farid. Op cit. h. 135-137 [↑](#footnote-ref-82)
83. Mohamad Mustari. Op.Cit. 173-17 [↑](#footnote-ref-83)
84. Daryanto dan Muhammad Farid. Op cit. h. 138-139 [↑](#footnote-ref-84)
85. Ibid. h. 140 [↑](#footnote-ref-85)
86. Akdon. Op .cit. h. 147-148 [↑](#footnote-ref-86)
87. Ibid h. 149 [↑](#footnote-ref-87)
88. Ngismatul Choiriyah. *Manajemen Sumber Daya AnggaranKeuangan Pendidikan*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 8, Nomor 1, Juni 2014 (Diakses 06 Januari 2017) [↑](#footnote-ref-88)
89. Daryanto dan Muhammad Farid. Op cit. h. 140-141 [↑](#footnote-ref-89)
90. Veithzal Rivai. Islamic Financial Management, teori, konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa. (Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2008). H. 385-414 [↑](#footnote-ref-90)
91. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 876 [↑](#footnote-ref-91)
92. Ibid*.* h. 805 [↑](#footnote-ref-92)
93. Ibid. h. 820 [↑](#footnote-ref-93)
94. Ibid. h. 113 [↑](#footnote-ref-94)
95. Ibrahim Bafadal, Seri Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi menuju Desentralisasi. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) hlm. 46 [↑](#footnote-ref-95)
96. Ibrahim Bafadal. Op cit. h. 49 [↑](#footnote-ref-96)
97. Ibrahim Bafadal. Op. Cit. h. 49 [↑](#footnote-ref-97)
98. Nanang Fattah. Op.cit. h.66 [↑](#footnote-ref-98)
99. Nanang Fattah. Op.cit. h.67 [↑](#footnote-ref-99)
100. Nanang Fattah. Op. Cit. 27 [↑](#footnote-ref-100)
101. Ibid. h. 27 [↑](#footnote-ref-101)
102. Ibid. h. 28 [↑](#footnote-ref-102)
103. Ibid. h. 27 [↑](#footnote-ref-103)
104. Ibid. h. 29 [↑](#footnote-ref-104)
105. Ibid. h. 27 [↑](#footnote-ref-105)
106. Ibid. h. 30 [↑](#footnote-ref-106)
107. Baharudin. Op.cit. h.2 [↑](#footnote-ref-107)
108. Ibid., h.15 [↑](#footnote-ref-108)
109. Luluk Atirotu Zahroh. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Usia Dini, (Yogyakarta: Lingkar Media, 2014) h. 26 [↑](#footnote-ref-109)
110. Ibid. h. 26-28 [↑](#footnote-ref-110)
111. Ibid. h. 29 [↑](#footnote-ref-111)
112. Ibid. h. 30 [↑](#footnote-ref-112)
113. Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, hlm. 136-137 [↑](#footnote-ref-113)
114. Mintarsih Danumihardja, *Manajemen Keuangan*, hlm 187-190 [↑](#footnote-ref-114)
115. Maman Rusmana, “Sistem pembiayaan..”, *Disertasi*, (Bandung: Sekolah PascasarjanaUniversitas Pendidikan Indonesia, 2005), hlm. 264 [↑](#footnote-ref-115)
116. Ahmad Munir. Op.cit. h. 237 [↑](#footnote-ref-116)
117. Nur Eka Setiowati. Manajemen pembiayaan pendidikan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Terpadu Nurushiddiq Cirebon.*Al Amwal* Vol 7, No 2 (2015). h.188 [↑](#footnote-ref-117)
118. Hanafiah. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan pada MAN 1 Sigli Kabupaten Pidie. Jurnal Eksperimental PGMI, Volume 1 nomor 2, Desember 2013. h.35 [↑](#footnote-ref-118)
119. Umi Zulfa. Membangun Madrasah bermutu melalui praktek manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat*. Jurnal Kependidikan* Volume 1, nomor 1, November 2013. h.22 [↑](#footnote-ref-119)
120. Susilawaty, Cut Zahri Harun, dan Khairuddin**.** Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh. Jurnal Administrasi Pendidikan. Volume 1, No. 2, November 2012. h. 34 [↑](#footnote-ref-120)
121. Moch. Idhochi Anwar, Transformasi biaya pendidikan dalam layanan pendidikan pada perguruan tinggi (profil layanan tenaga edukatif dalam proses belajar mengajar studi kasus pada IKIP Bandung, UNPAD, dan ITB), Disertasi, ( Bandung: Pasca Sarjana IKIP Bandung, 1990) [↑](#footnote-ref-121)
122. Yahya, *Sistem manajemen.* Hal 49 [↑](#footnote-ref-122)